

BAB III

ANALISIS BENTUK PERLAWANAN *PROTEST VOTERS* DALAM PILKADA SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

A. Dinamika Pencalonan

1. Proses Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul

Proses demokrasi ditandai dengan lahirnya seorang pemimpin yang berasal dari keputusan rakyat, keterlibatan rakyat dalam penentuan pemimpin merupakan suatu bentuk implementasi nyata dalam berdemokrasi selain tentunya menganut suatu keharusan untuk menjamin kemerdekaan warga negara untuk berserikat berkumpul dan mengemukakan pendapat, dan menjamin kebebasan warga negara dalam menentukan pemimpin baik di tingkat nasional maupun regional. Salah satu kemajuan proses demokrasi di Indonesia ditandai dengan adanya Pemilihan Umum langsung yang dilakukan oleh rakyat untuk di Republik Indonesia dan dimulai pada tahun 2004 dengan agenda pemilihan Kepala Negara Republik Indonesia.

Kemudian pemilihan langsung turut menjalar ke tingkat daerah sehingga Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak lagi melalui wakil-wakil rakyat di legislatif tapi rakyat diberikan kebebasan dan dijamin haknya untuk memilih pemimpinnya dalam masa bakti selama 5 tahun, sejarah Pilukada langsung pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005, perjalanan panjang demokrasi mengantarkan Indonesia pada suatu sistem baru bahwa Pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia akan dilakukan secara serentak dan hal tersebut dimulai

pada tahun 2015, dan salah satu kabupaten yang merasakan dan mengikuti pesta demokrasi bagi rakyat adalah Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi dibidang pariwisata, pangan dan kemajemukan di bidang UMKM serta sebagai Kabupaten yang berkepribadian dibidang kebudayaan catatan Kabupaten Bantul terus menjaga keasrian dan melestarikan warisan budaya yang terus dijaga dari massa ke massa, sehingga menjadi pemimpin Bantul diperlukan sebuah keahlian, ketelitian dan keberpihakkan kepada rakyat sehingga pada prosesnya Bantul sudah menjalani keikutsertaan Pemilukada sebanyak 3 kali, dengan menghasilkan 3 pemimpin yang berbeda berikut daftar Bupati dan Wakil Bupati Bantul sejak Pemilukada dilakukan secara langsung :

Tabel 3.1

Daftar Bupati dan Wakil Bupati Bantul sejak Pemilukada Langsung

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Periode Jabatan
1.	Drs. H Idham Samawi & Sumarno R.P.J	2005-2010
2.	Hj. Sri Surya Widati & Sumarno R.P.J	2010-2015
3.	Drs. H Harsono & H. Abdul Halim Muslih	2016-2021

Sumber : www.bantulkab.go.id

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul sudah mengalami 3 kali periode kepemimpinan sejak Pemilukada dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi sebagai catatan bahwa Drs. H. Idham Samawi sudah 2 periode menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bantul, yakni pada saat pasca reformasi ketika pemilihan Kepala Daerah masih melalui DPRD Drs.Idham Samawi sudah menjalani

5 tahun kepemimpinan atau satu periode sejak tahun 1999-2004 lalu pada tahun 2005 saat Pemilukada yang mekanismenya dilakukan pemilihan oleh rakyat secara langsung Drs.Idham Samawi kembali mendapatkan amanah rakyat untuk memimpin Bantul, sampai pada tahun 2010 Bantul kembali menyelenggarakan Pemilukada untuk mencari pemimpinnya dikarenakan Drs.Idham Samawi sudah 2 periode dan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan bahwa pemimpin eksekutif di tingkat nasional maupun daerah hanya diperkenankan selama 2 periode berurut-urut, hal ini kemudian mengharuskan hadirnya sosok calon pemimpin Baru di Bantul, sosok tersebut adalah Hj. Sri Surya Widati yang memimpin Bantul periode 2010-2015, akan tetapi jika dilihat dari silsilah bupati bantul periode 2010-2015 ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan Drs. Idham Samawi hubungan tersebut berupa pasangan suami istri.

Pada prosesnya menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa majunya Hj. Sri Surya Widati diakui oleh Drs. Idham Samawi sebagai sebuah kecelakaan politik dan berjanji dihadapan publik terutama di hadapan kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selaku partai pengusung Hj.Sri Surya Widati yakni bahwa Hj. Sri Surya Widati akan memimpin Kabupaten Bantul selama 1 periode, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan dinamika di internal PDIP Bantul pada saat Pemilukada serentak pada tahun 2015 PDIP kembali mengusung petahana, hal ini yang kemudian di gugat oleh banyak pihak dan memunculkan perlawanan sampai pada titik puncaknya terjadi pembelotan dan perpecahan di

internal PDIP Bantul karena keputusan Dewan Pimpinan Pusat kembali mengusung petahana.

Pada prosesnya Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul selaku kepanjangan tangan dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP kembali memunculkan nama petahana untuk direkomendasikan kembali agar dapat maju dalam kontestasi Pemilu di Kabupaten Bantul, akan tetapi proses pencalonan ini dianggap bermasalah oleh sebagian kader yang berada dalam struktural Dewan Pimpinan Cabang, bahkan sampai tingkatan Pengurus Anak Cabang yang berada di tingkat Kecamatan, hal ini di latarbelakangi oleh sebagian kader-kader PDIP di Dewan Pimpinan Cabang Bantul yang mendukung petahana berusaha memperlihatkan sikap memihak yang berorientasi bahwa Dewan Pimpinan Cabang secara sepihak menginginkan kembali petahana untuk kembali maju pada Pemilu 2015, sehingga kesan yang di munculkan bahwa petahana merupakan sosok yang berprestasi sehingga layak untuk kembali diusung oleh PDIP.

Akan tetapi hal ini dipandang sebagai kader-kader PDIP merupakan hal yang tidak etis karena partai memiliki mekanisme yang mengharuskan melakukan penjurangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung dalam Pemilu, keinginan sebagian kader-kader PDIP di Dewan Pimpinan Cabang Bantul untuk kembali mengusung petahana memiliki tujuan lain yakni ingin mencari perhatian dan simpatik dari Drs. H Idham Samawi yang pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua bidang organisasi Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Pilihan

berdasarkan pertimbangan bahwa petahana merupakan istri dari Drs. H. Idham Samawi, dalam rangka memuluskan rencana tersebut sebagian kader-kader PDIP di Dewan Pimpinan Cabang Bantul yang merupakan pendukung petahana menginginkan tidak adanya mekanisme penjarangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan masih menghendaki Hj. Sri Surya Widati untuk kembali sebagai bakal Calon Bupati Bantul Periode 2016-2021.

Hal tersebut yang kemudian tidak dikendaki oleh kader-kader PDIP yang menamakan diri pro perubahan, dengan mengasumsikan bahwa jika proses yang diinginkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dilakukan sedemikian rupa artinya partai harus dikorbankan untuk kepentingan sekelompok orang bahkan kepentingan individu, sehingga kader-kader PDIP yang pro perubahan menentukan sikap yakni partai harus membuka kesempatan yang sama dalam demokrasi untuk dipilih dan memilih, oleh sebab itu kader-kader PDIP pro perubahan mencoba melakukan penjarangan bakal calon secara informal untuk mencari sosok pemimpin yang diinginkan. Hal ini merupakan titik awal terjadinya konflik kepentingan di internal Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul, keberanian kader-kader yang pro perubahan tidak serta merta dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas sebab diantara kader-kader yang pro perubahan tersebut terdapat pengurus-pengurus yang memiliki jabatan strategis di Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul yang memiliki hak berdasarkan tupoksinya dan menduduki jabatan struktural yang memiliki daya tawar.

Kader-kader PDIP pro perubahan yang menempati jabatan strategis diantaranya Rajut Sukasworo sebagai wakil ketua bidang kaderisasi, organisasi dan *recrutment* termasuk penjangingan masuk Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tupoksinya berada dibidang ini, sedangkan Basuki Rahmat sebagai wakil ketua bidang advokasi dan hukum, dan Sutanto Nugroho merupakan wakil ketua bidang komunikasi serta terakhir yakni Ir Yulianto yang merupakan sekertaris Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul dan keempat tokoh PDIP tersebut semuanya pro perubahan.

Terdapat beberapa alasan kader-kader PDIP pro perubahan menghendaki adanya penjangingan bakal calon yakni *pertama* mengacu pada mekanisme partai, mekanisme partai sesuai AD/ART partai dalam penjangingan Bakal Calon Kepala Daerah terdapat 4 tahapan yang harus dilalui yang pertama sosialisasi di kalangan internal partai atau sering disebut aturan main partai serta melakukan sosialisasi di eksternal guna menjaring tokoh-tokoh non-kader PDIP, kemudian tahapan kedua penjangingan bakal calon, tahap ketiga adalah penyaringan bakal calon yang memuat beberapa tahapan yakni ; tes administratif, tes psikotes, uji kelayakan, tes kepemimpinan dan terakhir elektabilitas calon, kemudian tahapan terakhir adalah penetapan bakal calon yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

Realitas yang terjadi bahwa kader-kader pro perubahan tidak melihat adanya keinginan dan inisiatif serta terkesan mencoba meniadakan proses penjangingan bakal

calon dan mempersingkat waktu penjaringan bakal calon hal ini bertujuan agar hadirnya sosok tunggal yang bersedia maju dalam Pemilu pada 2015 yakni petahana, hal ini kemudian yang tidak diinginkan oleh kader-kader PDIP pro perubahan sehingga lahir sebuah gerakan dan gagasan oleh kader-kader PDIP Bantul yang menginginkan perubahan untuk melakukan penjaringan bakal calon sendiri.

Alasan yang *kedua* PDIP merupakan partai yang menganut sistem demokrasi bukan sistem monarki dimana kekuasaan diturunkan secara turun temurun, sehingga semua kader-kader PDIP di Internal atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki potensi dan memiliki keinginan berhak mengikuti dan memiliki kesempatan menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, hal ini tentu bersesuaian dengan jargon bahwa PDIP adalah partai yang berjuang bersama rakyat untuk menjamin aspirasi rakyat dan kesejahteraan rakyat. Analogi yang harusnya terbentuk jika keinginan rakyat Bantul mayoritas menginginkan perubahan kepemimpinan, sedangkan disisi lain PDIP justru kembali mengusung petahana maka secara otomatis hal yang disampaikan selama ini yakni menjamin aspirasi rakyat bukan merupakan cita-cita partai namun hanya sebuah slogan.

Alasan *ketiga* menyelamatkan nama baik partai, hal ini dikarenakan asumsi dan paradigma yang terbangun di masyarakat Bantul secara umum jika PDIP kembali mengusung petahana menunjukkan bahwa PDIP tidak lagi mencerminkan partainya “wong cilik” akan tetapi orientasi PDIP menuju pada keserakahan kekuasaan. Sebagai catatan alasan peraturan perundangan-undangan membatasi pimpinan

eksekutif di tingkat nasional sampai ke daerah hanya dibatasi sampai 2 periode saja agar tidak terjadi rezim kekuasaan yang mutlak dan mengakar sehingga setelah 2 periode terputus dan begitu seterusnya, pengalaman masa lalu mengajarkan saat era Orde Baru selama 32 tahun PDIP tidak mampu melakukan apa-apa karena rezim yang otoriter.

Memasuki era reformasi PDIP sebagai partai demokrasi dan partai yang mewakili rakyat kecil di Bantul pada khususnya tidak ingin mengulang hal yang dilakukan Partai Penguasa saat era Orde Baru, sistem yang tidak ingin terus dilanggengkan adalah kekuasaan yang diturunkan atau diwariskan, hal ini merupakan kemunduran bagi PDIP yang menjadikan demokrasi sebagai jalan pemersatu diatas perbedaan, sehingga persepsi perubahan yang kemudian di upayakan oleh kader-kader PDIP pro perubahan juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa PDIP Bantul tidak menginginkan dinasti politik terbentuk di Bantul.

Hal yang di inginkan oleh kader-kader pro perubahan adalah perkuatan sistem, karena sudah semestinya sistem yang berkuasa bukan hanya satu figur yang ditokohkan kemudian partai bergantung pada tokoh tersebut tetapi tujuan perkuatan sistem di pemerintahan adalah untuk menjamin terjadinya perkaderan dan lahan perjuangan kader-kader partai untuk membawa dan mengimplementasikan aspirasi rakyat, jika sistem yang berkuasa akan secara otomatis partai yang menguasai sistem akan menjadi partai yang besar.

Alasan *keempat*, sebagai bentuk eksistensi kader dan berjalannya proses perkaderan di PDIP, jika PDIP kembali mengusung petahana dan tidak melakukan pergantian maka paradigma yang muncul di masyarakat terhadap partai adalah PDIP Bantul minim kader berkualitas dan berkompeten, sedangkan realitanya PDIP Bantul memiliki banyak kader yang mempunyai kemampuan dan layak untuk memimpin Bantul, akan tetapi dengan sistem yang terorganisir dan dengan sengaja kembali mengusung petahana sehingga kesempatan tersebut tertutup bagi kader-kader PDIP.

Alasan *kelima*, kader-kader PDIP pro terhadap perubahan memiliki sikap empatik terhadap Hj. Sri Surya Widati yang hanya dijadikan boneka oleh Drs. H Idham Samawi karena pada realitasnya Hj. Sri Surya Widati tidak paham dan tidak mengerti secara detail mengenai pemerintahan, realita yang terjadi semua sumber kebijakan berasal dari Drs. H. Idham Samawi sehingga Hj. Sri Surya Widati dapat menyelesaikan periode kepemimpinan selama satu periode dengan selamat aman dan damai merupakan sebuah keberhasilan.

Alasan *keenam*, seperti yang sudah dijanjikan dan di sampaikan oleh Drs. H Idham Samawi ketika Hj. Sri Surya Widati terpilih sebagai Bupati Bantul pada tahun 2010 bahwa Hj. Sri Surya Widati diperuntukkan untuk 1 periode, untuk tahun 2015 Drs. H. Idham Samawi menginstruksikan dan mempersilahkan kepada kader-kader PDIP untuk melakukan penjarangan baik di internal kader PDIP atau tokoh-tokoh yang memiliki potensi dan kelayakan untuk memimpin Bantul, berdasarkan janji dan instruksi tersebut yang menjadi dasar dan landasan bagi kader-kader PDIP pro

perubahan bahwa Pemilu 2015 mengharuskan PDIP mencari sosok pemimpin baru yang akan di usung, akan tetapi kenyataan berkata lain apa yang disampaikan Drs. H. Idham Samawi tidak di realisasikan pada tahun 2015 yang kemudian memunculkan kekecewaan di tataran kader-kader PDIP yang pro perubahan.

Alasan *ketujuh* kader-kader PDIP pro perubahan menghendaki penjaringan bakal calon dikarenakan tokoh-tokoh yang disebutkan diatas menghendaki Dewan Pimpinan Cabang PDIP mencalonkan calon lain selain incumbent karena tokoh-tokoh diatas selama 2 tahun sebelum Pemilu 2015 atau 1 tahun sebelum pemilihan legislatif tahun 2014 sudah melakukan pengamatan dan survei dengan cara terjun langsung menuju Kecamatan, Kelurahan bahkan sampai tingkat Desa untuk menjaring aspirasi kader-kader PDIP yang ada di struktural maupun non-struktural tentu aspirasi yang dibawa oleh kader-kader PDIP di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa berdasarkan aspirasi dan keluhan masyarakat Bantul diwilayahnya masing-masing serta yang tidak kalah penting bahwa kader-kader PDIP pro perubahan juga sudah melakukan kajian terkait dengan keinginan Aparatur Sipil Negara secara umum sampai lapisan bawah yang menginginkan perubahan dikarenakan jenuh dengan konsep yang ditawarkan petahana.

Hasil aspirasi yang didapat dari tataran Pengurus Anak Cabang sampai di tingkat Pengurus Ranting PDIP Bantul bahwa mayoritas Kader PDIP di Bantul secara struktural dan perseorangan menginginkan perubahan kepemimpinan yang artinya PDIP Bantul pada Pemilu Bantul tahun 2015 untuk tidak lagi mengusung Hj.Sri

Surya Widati selaku petahana. Aspirasi yang berasal dari tataran bawah ini kemudian disampaikan oleh Ir.Yulianto dan Sutanto Nugroho untuk disampaikan langsung ke Drs. H Idham Samawi di Jakarta hal ini dilakukan karena merupakan bentuk permintaan Drs. H Idham Samawi terkait dinamika dan realitas yang ada di tataran internal PDIP Bantul.

Keinginan untuk pergantian kepemimpinan tersebut pada saat itu belum memiliki wadah sehingga baru pada tataran ide dan wacana belum ada gerakan yang masif untuk merealisasikan perubahan. Beberapa dari kader PDIP pro perubahan melakukan suatu tindakan untuk merealisasikan kebutuhan dan aspirasi dari tataran bawah dengan mewadahi dan menjamin aspirasi dari tataran bawah, realitanya bahwa mayoritas kader-kader PDIP Bantul di tataran Dewan Pimpinan Cabang, Pengurus Anak Cabang sampai Pengurus Ranting menginginkan perubahan kepemimpinan. Namun permasalahan yang muncul pada saat itu tidak ada sosok figur yang memberanikan diri untuk menjadi penantang petahana. Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri dikarenakan petahana sudah menduduki kekuasaan eksekutif selama 3 periode.

Pasca kader-kader partai yang duduk di struktural Dewan Pimpinan Cabang PDIP pro petahana mengetahui pergerakan kader-kader PDIP pro perubahan melakukan penjaringan secara informal mengenai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung oleh PDIP pada pilukada 2015, kemudian kader-kader PDIP pro petahana melakukan manuver politik dengan mengintervensi Pengurus

Anak Cabang agar kembali memunculkan petahana dalam proses penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul. Sehingga tidak mengejutkan ketika masih muncul nama Hj. Sri Surya Widati sebagai bakal calon karena dalam aturan internal partai bahwa setiap Pengurus Anak Cabang berhak mencalonkan 2 nama Bakal Calon yang akan diusung.

Pada saat sebelum digelarnya penjaringan Bakal Calon yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang PDIP terdapat proses panjang sehingga nama Suharsono mampu muncul dan unggul dengan memperoleh 14 suara Pengurus Anak Cabang dari 17 Pengurus Anak Cabang yang ada di Bantul, skema awal pencalonan bermula pada saat kader-kader PDIP pro perubahan yang sudah disebutkan namanya diatas (Rajut Sukasworo, Sutanto Nugroho, Ir.Yulianto dan Basuki Rahmat) terjun langsung kebawah demi menjaring aspirasi dan keinginan dari tataran kader-kader PDIP yang ada di Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting, setelah melakukan proses tersebut maka di dapat sebuah kesimpulan bahwa mayoritas Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting PDIP Bantul menginginkan perubahan kepemimpinan.

Namun pada saat tersebut keinginan akan perubahan belum menjadi prioritas utama karena tidak memiliki wadah untuk bermusyawarah dalam merumuskan keinginan tersebut untuk menjadi kenyataan dan belum ditemukan sosok calon yang layak dan bersedia untuk mendeklarasikan diri menjadi kompetitor petahana dalam Pemilkuda Bantul 2015, langkah awal yang diambil oleh 4 kader PDIP Bantul pro perubahan dengan mendengarkan aspirasi dan isu yang berkembang di masyarakat

pada saat yang bersamaan ke empat tokoh tersebut mendengar isu bahwa pada tahun 2010 Suharsono berkenginan maju sebagai Bakal Calon Bupati dari PDIP, namun terdapat 2 pertimbangan penting yang mengharuskan Suharsono mengurungkan keinginan dan niat menjadi Bakal Calon Bupati Bantul tahun 2010.

Alasan yang *pertama*, pada tahun 2010 Suharsono masih menjabat di instansi kepolisian dan pada tahun tersebut Suharsono belum mendekati waktu pensiun dari instansi kepolisian. Alasan *kedua*, Suharsono melihat bahwa kekuatan petahana atau keluarga Drs. H. Idham Samawi di Bantul bersama PDIP begitu adidaya sehingga peluang bagi Suharsono hampir dipastikan tidak ada. Berdasarkan fakta tersebut menjadi pertimbangan mendasar bagi Suharsono untuk mengurungkan niat mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Bantul tahun 2010 melalui PDIP. Berita tersebut terdengar dan sampai pada 4 kader PDIP pro perubahan yang selanjutnya berinisiatif menemui Suharsono untuk menyampaikan aspirasi dari kader-kader PDIP Bantul secara mayoritas menginginkan adanya perubahan sosok kepemimpinan di Bantul, setelah melakukan komunikasi dan *lobby* terbentuk suatu kesepakatan bahwa Suharsono bersedia dicalonkan menjadi Bakal Calon Bupati Bantul pada Pemilu pada tahun 2015 sebagai penantang petahana.

Persoalan elektabilitas Suharsono yang rendah menjadi tantangan bagi 4 kader PDIP pro perubahan, hal tersebut disebabkan sosok Suharsono tidak begitu dikenal ditataran masyarakat Bantul khususnya mayoritas kader-kader PDIP yang berada di struktural Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting karena Suharsono bukan

merupakan kader internal PDIP dan Suharsono yang memiliki latar belakang kepolisian tidak pernah bertugas di Kabupaten Bantul, Suharsono menghabiskan kariernya dalam dunia kepolisian di luar Kabupaten Bantul. Langkah awal yang dilakukan oleh 4 Kader pro perubahan setelah Suharsono bersedia dicalonkan sebagai Bakal Calon Bupati pada Pemilu Kabupaten Bantul tahun 2015 adalah melakukan sosialisasi kepada kader-kader yang ada di struktural Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting PDIP se- Kabupaten Bantul.

Sosialisasi yang dilakukan bersifat Informal karena tidak tercantum dalam agenda partai, sosialisasi tersebut memiliki 2 tujuan *pertama*, memperkenalkan dan mempertemukan Suharsono dengan kader-kader PDIP yang ada di struktural Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting dengan harapan seluruh kader-kader PDIP di tataran Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting mengetahui sosok Suharsono sehingga ketika dikemudian hari terdapat pertanyaan dari Partai dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul mengenai Suharsono Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting mengetahui dan memahami latar belakang serta sosok Suharsono secara mendalam.

Tujuan *kedua*, kesempatan sosialisasi yang dilakukan terhadap kader-kader PDIP ditataran Pengrus Anak Cabang dan Pengurus Ranting bermaksud untuk melihat kelayakan Suharsono, pada momen sosialisasi terjadi proses penilaian yang dilakukan oleh Pengurs Anak Cabang dan Pengurus Ranting terkait figur Suharsono, setelah melakukan proses *lobby* dan sosialisasi di dapatkan sebuah keputusan

bersama bahwa mayoritas Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting menyetujui dan merestui Suharsono untuk menjadi Bakal Calon Bupati Bantul pada Pemilu 2015. Berdasarkan kesepakatan yang berasal dari suara mayoritas tersebut kader-kader PDIP pro perubahan bersama mayoritas Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting bersepakat bahwa Suharsono akan direkomendasikan dan dimunculkan dalam penjurangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PDIP Bantul.

Pemilihan terhadap Suharsono tidak dapat dilepaskan dari 4 aspek fundamental yang menjadi alasan bagi kader-kader PDIP pro perubahan memberikan restu pada Suharsono aspek tersebut meliputi, *pertama* mentalitas yang dimiliki Suharsono tidak dapat dianggap sebelah mata meskipun petahana memiliki berbagai keunggulan dari segala bidang akan tetapi keyakinan Suharsono akan menang tetap teguh dipertahankan, hal ini dikarenakan masyarakat Bantul sudah jenuh dengan kepemimpinan keluarga Drs. H Idham Samawi di Kabupaten Bantul. Kehadiran Suharsono merupakan sebuah jawaban atas kesulitan yang dialami selama ini untuk mencari sosok yang bersedia dan layak menjadi penantang petahana.

Alasan *kedua*, Suharsono memiliki keunggulan yang tidak dimiliki petahana yakni sosok Suharsono yang merupakan putra daerah asli Kabupaten Bantul. Isu mengenai putra asli daerah semakin kuat dihembuskan untuk menunjukkan bahwa putra daerah asli Bantul ada yang memiliki kemampuan dan memiliki integritas untuk memimpin Bantul, dan alasan *ketiga* Latar belakang keluarga Suharsono berasal dari keluarga yang mayoritas pengikut PNI, ditinjau dari sisi ideologis hal tersebut sejalan

dengan ideologis PDIP yang juga bersifat Nasionalis. Pertimbangan ideologis yang sejalan antara PNI dan PDIP yang menguatkan keyakinan Suharsono secara personal untuk melangkah maju sebagai Bakal Calon Bupati Bantul pada Pemilu 2015 melalui pintu PDIP.

Faktor *keempat*, pada waktu yang bersamaan dengan gencarnya sosialisasi Suharsono di tataran internal PDIP kader-kader PDIP pro perubahan menjajaki partai-partai Politik yang memiliki suara di parlemen Kabupaten Bantul dengan harapan ada keberanian dan keinginan untuk menghentikan dinasti keluarga Drs. H. Idham Samawi. Namun realita yang terjadi hasil penjajakan dan *lobby* yang dilakukan tidak membuahkan hasil, hal ini dikarenakan tidak ada Partai Politik yang memiliki keberanian untuk menantang petahana, hanya PKB yang berkeinginan menempatkan kadernya sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Bantul. Kondisi tersebut tidak terlepas dari komitmen yang disepakati oleh PKB dengan petahana, kesepakatan tersebut adalah bahwa PKB harus memunculkan calon lain sebagai kompetitor petahana dengan tujuan tidak terjadi Pemilu Tunggal atau Penundaan Pemilu di Bantul pada tahun 2015, hal ini bisa terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu narasumber yang berbunyi¹ :

“Kalo PKB sudah menurunkan surat rekomendasi, sebab PKB sudah komitmen dengan incumbent bahwa harus memunculkan calon jangan sampai pemilu tunggal atau ditunda sehingga beliau berusaha mencari rival bagi petahana”

¹ Wawancara dengan Rajut Sukasworo ketua Suharsono Center

Pada saat proses *lobby* dengan beberapa Partai Politik kader-kader PDIP pro perubahan tidak menyampaikan nama Suharsono, dengan pertimbangan kepantasan dan etika dalam proses *lobby* serta ditinjau dari aspek tujuan kader-kader PDIP pro perubahan adalah pergantian kepemimpinan dan pemutusan rezim keluarga Drs. H. Idham Samawi tanpa melihat ideologi atau partai politik sosok calon yang akan diusung. Namun keyakinan seluruh Partai Politik bahwa akan menderita kekalahan ketika berkompetisi dengan Petahana hal tersebut dipandang sebagai sebuah usaha yang sia-sia karena akan merugikan Partai Politik dari sisi biaya, waktu dan tenaga jika harus mengkonsolidasikan kader-kader di internal masing-masing Partai Politik.

Dinamika internal yang bergulir di internal PDIP Bantul mempengaruhi sikap politik partai-partai politik lain yang ada di Bantul, hal ini disebabkan 2 hal *pertama*, PKB sudah menentukan sikap akan mencarikan rival bagi petahana dalam Pemiluakada Bantul 2015 akan tetapi posisi yang diinginkan hanya Calon Wakil Bupati sehingga posisi Calon Bupati belum ada yang menempati. Faktor *kedua* partai-partai politik yang memiliki suara di parlemen atau DPRD Bantul yang memiliki hak untuk mencalonkan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak memiliki alternatif calon yang sepadan untuk menandingi petahana.

Partai-Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Bantul telah mengetahui bahwa Suharsono sudah mendapatkan dukungan dari sebagian Kader PDIP yang ada di struktural dan non struktural, secara hitung-hitungan politis kemungkinan Suharsono untuk di usung PDIP Bantul akan mengecil ketika Petahana kembali

masuk dalam Bakal Calon Bupati Bantul di internal PDIP, berdasarkan pertimbangan tersebut yang nantinya menjadi salah satu sebab pendaftaran Harsono-Halim sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul di Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul terjadi *last minute* tepatnya 2 jam sebelum penutupan pada hari terakhir pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada Pemilu 2015.

Gerakan Politik yang dinamis di Bantul terus bergulir sampai pada akhirnya muncul instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP agar Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul melakukan penjaringan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati secara resmi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan partai. Proses penjaringan yang dilakukan melibatkan seluruh Pengurus Anak Cabang PDIP Bantul yang berjumlah 17, jumlah tersebut berasal dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bantul. Hasil dari proses penjaringan sesuai dengan prediksi dan keinginan kader-kader PDIP pro perubahan dengan menempatkan Suharsono pada urutan teratas dalam memperoleh dukungan Pengurus Anak Cabang yakni berjumlah 14 sedangkan Petahana hanya didukung oleh 8 Pengurus Anak Cabang.

Hasil yang didapat dari proses penjaringan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP untuk dilakukan berikutnya yakni tahapan penyaringan dan tahapan terakhir dikeluarkan surat rekomendasi yang akan di daftarkan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul di Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul. Berdasarkan hasil penjaringan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul menghasilkan rekapitulasi seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

**Hasil Rekapitulasi Calon Bupati/Wakil Bupati Bantul oleh PAC se-KAB.
Bantul**

No.	Jumlah Kecamatan	Nama Calon	Keterangan
1.	14 Kecamatan	AKBP Suharsono	Balon Bupati
2.	8 Kecamatan	Sri Surya Widati	Balon Bupati
3.	5 Kecamatan	Joko B Purnomo	Balon Wakil Bupati
4.	1 Kecamatan	Untoro Haryadi M,Si	Balon Bupati
5.	1 Kecamatan	Hanung	Balon Wakil Bupati

Sumber : Relawan Jas Merah 2015

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa keinginan perubahan kepemimpinan terus menguat dan tidak sekedar wacana ini dibuktikan hasil resmi dari penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul menempatkan Suharsono dengan suara terbanyak yakni 14 suara dari total 17 suara yang memiliki hak suara.

Pada realitanya muncul beberapa nama calon seperti, Joko Purnomo, Untoro Haryadi dan Hanung namun ketiga nama yang diusulkan tersebut terbentur oleh sistem, karena posisi tokoh-tokoh diatas adalah kader partai dan tidak memiliki keberanian untuk menentang Drs. H.Idham Samawi. Sedangkan disisi lain Suharsono tampil tanpa beban dan memiliki keberanian untuk melawan petahana hal ini dikarenakan Suharsono bukan merupakan kader PDIP, sikap yang ditunjukkan oleh Suharsono semakin mensolidkan Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting untuk menyatukan dukungan terhadap Suharsono.

Untuk mengetahui secara terperinci penjurangan Bakal Calon di internal PDIP

Bantul dapat melihat tabel dibawah ini ;

Tabel 3.3

Hasil Penjurangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bantul oleh PAC se-KAB. Bantul

No	Kecamatan	Nama Calon	Keterangan
1	Bantul	1. AKBP Suharsono 2. Untoro Haryadi M,Si	Balon Bupati
2	Sewon	AKBP Suharsono	Balon Bupati
3	Banguntapan	1. AKBP Suharsono 2. Hj. Sri Surya Widati	Balon Bupati
4	Piyungan	1. AKBP Suharsono 2. Joko B Purnonomo	1. Balon Bupati 2. Balon Wakil Bupati
5	Imogiri	1. AKBP Suharsono 2. Joko B Purnomo	1. Balon Bupati 2. Balon Wakil Bupati
6	Pleret	1. Sri Surya Widati 2. Hanung	1. Balon Bupati 2. Balon Wakil Bupati
7	Dlingo	1. AKBP Suharsono 2. Joko B purnomo	1. Balon Bupati 2. Balon Wakil Bupati
8	Jetis	AKBP Suharsono	Balon Bupati
9	Bambanglipuro	1. AKBP Suharsono 2. Sri Surya Widati	Balon Bupati
10	Pundong	1. AKBP Suharsono 2. Joko B Purnomo	1. Balon Bupati 2. Balon Wakil Bupati
11	Kretek	1. AKBP Suharsono 2. Sri Surya Widati	1. Balon Bupati 2. Balon Bupati
12	Sanden	1. AKBP Suharsono 2. Joko B purnomo	1. Balon Bupati 2. Balon Wakil Bupati
13	Pandak	1. AKBP Suharsono 2. Sri Surya Widati	Balon Bupati
14	Srandakan	Sri Surya Widati	Balon Bupati
15	Pajangan	1. AKBP Suharsono 2. Sri Surya Widati	Balon Bupati
16	Kasihani	1. AKBP Suharsono 2. Sri Surya Widati	Balon Bupati
17	Sedayu	TIDAK KORUM	

Sumber : Relawan Jas Merah 2015

Pasca penjarangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul di Dewan Pimpinan Cabang PDIP dukungan terhadap Suharsono terus bergulir, dukungan tersebut berasal dari kader-kader PDIP pro perubahan yang diwujudkan melalui surat pernyataan dukungan terhadap Suharsono dengan tujuan meyakinkan Dewan Pengurus Pusat PDIP bahwa Suharsono secara nyata didukung sampai ditataran Pengurus Ranting PDIP di Bantul. Selain sebagai bentuk langkah nyata dukungan terhadap Suharsono hal tersebut dimaksudkan agar Dewan Pengurus Pusat PDIP memperhatikan suara dan aspirasi dari tataran bawah, Karena harapan kader-kader PDIP pro perubahan pengambilan keputusan tidak bersifat *Top Down* tetapi *Bottom Up*.

Keinginan perubahan kepemimpinan tercermin dengan terkumpulnya jumlah dukungan sebanyak 42 pernyataan dukungan secara tertulis dari 75 pengurus ranting PDIP yang ada di Kabupaten Bantul, surat pernyataan dukungan yang digagas oleh Pengurus Ranting semakin memperkuat bahwa dukungan kepada Suharsono sebagai Bakal Calon Bupati tidak berdasarkan permintaan kelompok tertentu tetapi berdasarkan atas keinginan Pengurus Ranting yang menginginkan perubahan, surat dukungan tersebut tidak disampaikan kepada 4 tokoh kader PDIP yang disebutkan pada pembahsan sebelumnya akan tetapi surat dukungan tersebut disampaikan sendiri oleh Pengurus-Pengurus Ranting PDIP kepada Dewan Pengurus Pusat PDIP. Fakta

ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang menyatakan bahwa² :

“Pengurus Ranting yang memberikan surat pernyataan dukungan terhadap pak Har tidak semua, padahal jumlahnya lebih dari itu , ini dikarenakan ada tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak penguasa yang menyebabkan ada beberapa ranting yang tidak berani mengeluarkan surat pernyataan dukungan secara langsung”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa dengan adanya intimidasi dan penekanan-penekanan oleh pihak pro petahana menyebabkan Pengurus Ranting tidak memiliki kebebasan dalam memeberikan dukungan, hal ini tentu tidak terlepas dari ketakutan pihak pro petahana akan mempengaruhi keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP dengan melihat dukungan yang begitu besar dan masif kepada Suharsono sampai pada tataran Pengurus Ranting.

Untuk membendung dukungan terhadap Suharsono kader-kader PDIP pro petahana menerapkan cara-cara intimidasi dan intervensi, hal ini dilakukan sebagai anti tesis dan bentuk perlawanan terhadap kader-kader yang tidak memiliki kesamaan pandangan dengan kader-kader pro petahana, seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber relawan jas merah sebagai berikut³ :

“Jadi startegi yang dipakai adalah mereka bergerilya menyelenggarakan terlebih dahulu dan semuanya tentu berdasar uang. Sistem yang dipakai oleh DPC adalah bergerilya dengan mengintervensi dan melakukan pemaksaan.”

² Wawancara dengan Sutanto Nugroho pendiri Jas Merah

³ Wawancara dengan Rajut Sukasworo ketua Suharsono Center

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa politik intimidasi, politik kekerasan dan politik transaksional sudah berlangsung pada saat pra penjurangan dan saat penjurangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa cara intimidasi dan intervensi yang dilakukan oleh kader-kader PDIP pro petahana dilakukan setelah usaha pertama yang diupayakan untuk menyempitkan waktu pendaftaran penjurangan Bakal Calon tidak berhasil, dilatarbelakangi keluarnya instruksi dari Dewan Pengurus Pusat PDIP kepada Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul untuk melakukan penjurangan, selain itu terjadi keadaan diluar prediksi berupa kuatnya dukungan terhadap Suharsono yang berasal dari kader-kader PDIP di Dewan Pimpinan Cabang, Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting yang menyuarakan perubahan kepemimpinan merupakan suatu keharusan dan keyakinan untuk menyelamatkan partai dan membawa aspirasi dari tataran bawah.

Gerakan gerilya yang dilakukan kader-kader pro petahana dengan memaksakan munculnya nama petahana pada proses penjurangan bertujuan agar petahana dapat mengikuti proses seleksi di Dewan Pimpinan Pusat PDIP karena tugas utama Dewan Pimpinan Cabang sesuai instruksi Drs. H. Idham Samawi adalah untuk memunculkan nama petahana agar dapat mengikuti proses seleksi di Dewan Pimpinan Pusat PDIP, jika hal tersebut terjadi peluang kembali terpilihnya petahana sebagai bakal calon Bupati Bantul akan semakin besar karena kehadiran sosok Drs. H Idham Samawi di Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Bertolak belakang dengan kondisi yang dialami oleh

kader-kader pro perubahan yang tidak memiliki keterwakilan untuk memperjuangkan Suharsono di tataran Dewan Pimpinan Pusat PDIP, seperti hasil wawancara penulis dengan Sutanto Nugroho seperti berikut ⁴ :

“Tidak munculnya nama Pak Har di surat rekomendasi karena di DPP keterwakilan kami yang menginginkan perubahan tidak ada, sehingga Pak Har dihabisi total disana walaupun beliau didukung dari tataran bawah”

Untuk mengetahui Ranting-Ranting PDIP Bantul yang melampirkan surat pernyataan dukungan kepada Suharsono dapat dilihat di tabel berikut :

⁴ Wawancara dengan Sutanto Nugroho pendiri Jas Merah

Tabel 3.4**Pernyataan dukungan kepada Suharsono sebagai Calon Bupati Bantul oleh Pengrus Ranting PDIP Bantul**

No.	Kader Yang Bertanggung Jawab	Jabatan	Desa
1.	Lestantun	Ketua	Desa Canden
2.	Djuwardi	Ketua	Desa Sumber Agung
3.	Muh. Mahfud	Ketua	Desa Panjang Rejo
4.	Purwanto	Ketua	Desa Trimulyo
5.	Sutarwoco	Ketua	Desa Singosaren
6.	Nurkhasan	Ketua	Desa Tamanan
7.	Sugiyarti	Ketua	Desa Murtigading
8.	Purwanto	Ketua	Desa Srihardono
9.	Suroto	Ketua	Desa Imogiri
10.	Ngadi	Ketua	Desa Kebon Agung
11.	Wartiyo	Ketua	Desa Seloharjo
12.	Wardani	Ketua	Desa Sendang Sari
13.	Suhadi	Ketua	Desa Guwosari
14.	Wiharto	Ketua	Desa Siti Mulyo
15.	Harjono	Ketua	Desa Srimartani
16.	Suko Adi	Ketua	Desa Srimulyo
17.	Burham Wahyudi	Ketua	Desa Donotirto
18.	Tukimin	Ketua	Desa Parang Tritis
19.	Kasimin	Ketua	Desa Tirtosari
20.	Imam Sutrisno	Ketua	Desa Bantul
21.	Dawis Krisdayanto	Ketua	Desa Palbapang
22.	Suyatno	Sekretaris	Desa Sabdodadi
23.	Giyanto	Wakil Ketua	Desa Baturetno
24.	Marwoto	Ketua	Desa Karang Tengah
25.	Dulmanan	Ketua	Desa Gading Harjo
26.	Bejo Santoso	Ketua	Desa Sri Gading
27.	Sarjiman	Ketua	Desa Gading Sari
28.	Panggiyo	Sekretaris	Desa Mangunan
29.	Purnomo Hadi	Ketua	Desa Dlingo
30.	Girin	Ketua	Desa Temuwuh
31.	Suyoto	Ketua	Desa Jatimulyo
32.	Sukir	Ketua	Desa Terong
33.	Suparmin	Ketua	Desa Muntuk
34.	Agus Subekti	Ketua	Desa Gilang Harjo
35.	Wardani	Wakil Ketua	Desa Triharjo
36.	Suwandi	Ketua	Desa Catur Harjo

37.	Suratman	Wakil Ketua	Desa Wijirejo
38.	Suharjo	Ketua	Desa Tri Renggo
39.	Riyadi	Ketua	Desa Ringin Harjo
40.	Mukhlis	Ketua	Desa Patalan
41.	Bowo Purwono	Ketua	Desa Tirto Mulyo
42.	Mardani	Ketua	Desa Triwidadi

Sumber : Relawan Jas Merah 2015

2. Kelahiran *Suharsono Center*

Pada saat proses penyaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati terjadi di Dewan Pimpinan Pusat PDIP, kader-kader PDIP yang menyuarakan perubahan dan mendukung Suharsono bermufakat membentuk sebuah wadah berupa sekretariat yang dijadikan sarana dalam pemberian penegasan serta sebagai bahan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP untuk memperhitungkan Suharsono. Sekretariat tersebut terbentuk dan dinamakan *Suharsono Center* yang di inisiasi oleh kader-kader pro perubahan.

Suharsono Center memiliki 3 tujuan utama yakni, *pertama* untuk menaikkan elektabilitas Suharsono di mata masyarakat Bantul selaku konstituen dalam Pemiluakada, hal ini dilakukan karena tingkat popularitas Suharsono di Bantul rendah, faktor utama yang melatarbelakangi hal tersebut adalah walaupun Suharsono merupakan putra asli Bantul Suharsono semasa hidupnya banyak dihabiskan mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian diluar Bantul untuk itu *Suharsono Center* menjadi penting sebagai bentuk marketing Suharsono untuk dapat dikenal khalayak publik.

Tujuan *kedua*, kader-kader pro perubahan ingin menunjukkan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP bahwa Suharsono memiliki basis masa pendukung dan memiliki posisi sebagai tokoh yang diperhitungkan di Bantul, serta menunjukkan kesiapan Suharsono dalam berkompetisi untuk Pemiluakada Bantul tahun 2015. Hal tersebut menjadi krusial mengingat salah satu tes yang digunakan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP pada saat proses seleksi adalah mengukur tingkat elektabilitas Bakal Calon, sehingga ketika partai bekerjasama dengan lembaga survei dalam mengukur elektabilitas perolehan suara Suharsono tidak akan meraih persentase nol persen karena jika hal tersebut terjadi sudah dipastikan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak mungkin memunculkan nama Suharsono.

Tujuan *ketiga*, adalah untuk memberikan wadah bagi seluruh elemen lapisan masyarakat yang menginginkan perubahan khususnya bagi para Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Cabang dalam melakukan konsolidasi. Konsolidasi yang dilakukan di *Suharsono Center* menghasilkan konsep kemenangan dan strategi untuk memenangkan Suharsono hal ini dipersiapkan sebagai bentuk kesungguhan kader-kader PDIP pro perubahan menyambut perubahan kepemimpinan di Bantul seperti petikan hasil wawancara penulis dengan narasumber sebagai berikut⁵ :

“Konsep awal sebelum pak har bergabung dengan Gerindra dan PKB kita relawan jas merah yang saat itu masih berada dalam suharsono center sudah memiliki konsep kemenangan dan ketika pak har sudah dipastikan maju lewat Gerindra dan PKB konsep tersebut kita serahkan dan kita bergerilya diluar sistem”

⁵ Wawancara penulis dengan Sutanto Nugroho pendiri Jas Merah

Dari sisi ke anggoataan yang terlibat dalam *Suharsono Center* terdiri dari berbagai macam kalangan walaupun yang menginisiasi terbentuknya *Suharsono Center* adalah kader-kader PDIP pro perubahan. Keseriusan dan kesungguhan kader-kader PDIP yang sudah menyatakan dukungan terhadap Suharsono dibuktikan dengan rutin melakukan konsolidasi penguatan internal untuk memenangkan Suharsono dan konsolidasi diikuti dari setiap elemen yang ada di struktural PDIP Bantul mulai dari tataran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting yang keseluruhan bersepakat untuk mendukung Suharsono demi pemutusan rezim kekuasaan keluarga Drs.H Idham Samawi.

Konsolidasi yang masif dilakukan untuk memenangkan Suharsono dilakukan karena meyakini dengan suara mayoritas Pengurus Anak Cabang mendukung Suharsono harapan rekomendasi yang turun dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP adalah Suharsono karena merupakan keinginan suara mayoritas kader-kader PDIP. Mendekati terbitnya rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat suasana dalam internal PDIP Bantul diwarnai dengan ketegangan yang semakin meruncing hal ini dikarenakan menguatnya isu bahwa kader-kader PDIP pro perubahan dikondisikan dengan uang oleh sejumlah oknum untuk mendukung Suharsono.

Isu yang berkembang di internal PDIP Bantul kemudian dibantah dan tidak dibenarkan oleh kader-kader PDIP pro perubahan, salah satu faktor penting keberhasilan mendapatkan mayoritas dukungan Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting karena 4 tokoh penggerak dan pencetus perubahan yang disebutkan pada

pembahasan sebelumnya mampu berkomunikasi dari hati ke hati untuk menyampaikan realita bahwa Bantul membutuhkan perubahan serta ditunjang dengan kejenuhan kader-kader PDIP terhadap dinasti politik yang diciptakan Drs. H. Idham Samawi. Momentum Pemilu 2015 merupakan saat terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dan pada momentum tersebut pula ditemukan sosok Suharsono yang memiliki tekad dan keberanian menantang petahana.

3. Proses Penyaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul

Momen yang dinanti akhirnya tiba yakni dikeluarkannya surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat terkait nama Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung oleh PDIP dalam Pemilu 2015, akan tetapi nama calon yang muncul bukan merupakan bakal calon yang mendulang suara dukungan terbanyak yakni Suharsono, namun justru nama Hj. Sri Surya Widati dan Misbakhul Munir yang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul yang akan diusung PDIP untuk memimpin Bantul pada periode 2016-2021, rekomendasi tersebut menimbulkan kekecewaan yang mendalam di tataran kader-kader PDIP pro perubahan.

Pasca turunnya surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP maka kader-kader PDIP pro perubahan bergerak cepat untuk melakukan konsolidasi menanggapi hasil rekomendasi yang diturunkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Konsolidasi yang dilakukan menghasilkan beberapa keputusan yang diambil secara mufakat, keputusan tersebut diantaranya adalah *pertama* kader-kader PDIP pro

perubahan sepakat untuk tidak mempersoalkan rekomendasi yang turun dari Dewan Pimpinan Pusat akan tetapi kader-kader pro PDIP pro perubahan berkeinginan membuktikan bahwa keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP mengusung petahana adalah sebuah kesalahan karena tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas kader-kader PDIP yang ada di Bantul mulai dari tataran Dewan Pimpinan Cabang, Pengurus Anak Cabang, dan Pengurus Ranting.

Keputusan *kedua*, kader-kader PDIP pro perubahan mempersilahkan kepada Suharsono untuk mendaftarkan diri maju sebagai Calon Bupati Bantul melalui Partai Politik lain selain PDIP hal ini demi mewujudkan cita-cita akan perubahan kepemimpinan dan penghentian rezim, keputusan *ketiga* posisi kader-kader PDIP pro perubahan tetap mendukung Suharsono namun dengan posisi berada diluar sistem. Keputusan untuk berada diluar sistem pemenangan Suharsono dipilih dengan pertimbangan kader-kader PDIP pro perubahan tidak mungkin bergabung dengan sistem partai pengusung Suharsono karena masih merupakan kader PDIP, akan tetapi tetap akan ikut berjuang memenangkan Suharsono pada Pemiluakada mendatang. Bentuk dukungan diluar sistem di implementasikan secara nyata dengan membentuk relawan Suharsono yang diberi nama Relawan Jas Merah, keadaan yang tidak berpihak pada kader-kader pro perubahan merupakan titik awal lahirnya Relawan Jas Merah di Bantul menjelang Pemiluakada 2015.

Proses dinamika pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul belum berhenti pasca turunnya surat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat PDIP, partai-

partai politik yang belum menentukan sikap dan posisi pada Pemilu 2013 di Bantul memulai babak baru di internal pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasca mengetahui PDIP akan kembali mengusung petahana Koalisi Merah Putih di Bantul yang terdiri dari Gerindra, PKS, PKB, dan PAN mulai melakukan manuver politik untuk menghadirkan calon penantang bagi petahana, dan satu nama yang menjadi fokus utama adalah Suharsono.

Proses pencalonan Suharsono melalui Partai Gerindra melalui proses yang cukup panjang, setelah dipastikan tidak diusung oleh PDIP Suharsono mulai di jajaki oleh Koalisi Merah Putih terutama dari PKB, hal ini dikarenakan PKB memiliki kepentingan pada Calon Wakil Bupati Bantul serta dilatarbelakangi PKB sudah memiliki komitmen dengan petahana untuk mencari kompetitor bagi petahana dalam Pemilu 2013 di Bantul, setelah melalui proses *lobby* dengan Koalisi Merah Putih di Bantul serta telah mendapatkan restu dari kader-kader PDIP pro perubahan Suharsono disarankan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Bantul melalui Partai Gerindra. Hal ini dapat terjadi karena telah melalui mekanisme yang panjang, proses *lobby* antara Suharsono dengan Koalisi Merah Putih sudah berlangsung sejak Suharsono mendaftar di PDIP, pasca surat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat PDIP turun *lobby* tersebut dilanjutkan dan menghasilkan kesepakatan politik bahwa Suharsono akan maju sebagai Calon Bupati melalui Partai Gerindra yang kemudian dipasangkan dengan Abdul Halim Muslih dari PKB sebagai Calon Wakil Bupati dengan melibatkan PAN, Golkar dan PKS sebagai partai pendukung.

Latar belakang keberhasilan Suharsono menjadi Calon Bupati Bantul dari Partai Gerindra disebabkan beberapa faktor, *pertama* kiprah Suahrsono sampai pada akhirnya diusung oleh Partai Gerindra tidak terlepas dari peran petahana dan Drs. H. Idham Samawi karena pada saat akan mendaftarkan diri melalui Partai Gerindra Suharsono dan kader-kader PDIP pro perubahan tidak mampu menyiapkan mahar politik yang diajukan Partai Gerindra karena nilainya terlalu tinggi. Pada saat yang bersamaan lahir wacana bahwa Suharsono akan maju melalui jalur perseorangan akan tetapi berdasarkan hitung-hitungan biaya jika hal tersebut dilakukan akan memakan jumlah dana yang tidak sedikit karena syarat maju melalui jalur perseorangan harus mengumpulkan syarat minimal KTP.

Momen tersebut dimanfaatkan oleh Drs. H. Idahm Samawi untuk mendorong Partai Gerindra agar mengusung Suharsono untuk menjadi kompetitor bagi petahana agar tidak terjadi Pemilukada Tunggal atau penundaan Pemilukada hal ini diperkuat dengan hadirnya PKB dalam proses *lobby* untuk turut meyakinkan Suharsono maju melalui Koalisi Merah Putih. Keputusan Drs. H. Idham Samawi melaukan tindakan tersebut bukan tanpa perhitungan, hal ini berdasarkan pada saat Suharsono mengikuti proses penyaringan di Dewan Pimpinan Pusat PDIP sebagai Bakal Calon Bupati Bantul yang bertindak sebagai tim penyeleksi di Dewan Pimpinan Pusat PDIP adalah Drs.H. Idham Samawi.

Berdasarkan hasil analisis Drs.H. Idham Samawi jika Suharsono menjadi kompetitor petahana dipastikan tidak akan mungkin menang, alasan yang mendasari

keyakinan Drs. H. Idham Samawi akan hal tersebut didasari dengan melihat sumber daya politik yang dimiliki oleh Suharsono mulai dari basis dukungan, kekuatan finansial, elektabilitas, dan pengalaman di pemerintahan jika di bandingkan dengan petahana maka peluang kemenangan Suharsono dinilai Drs. H. Idham Samawi sangat kecil dan berpotensi untuk kalah mutlak, sehingga Drs. Idham Samawi mendorong agar Partai Gerindra mengukung Suharsono. Hal ini dapat tercermin dari hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber, berikut salah satu petikan wawancara tersebut ⁶ :

“Kiprah Pak Harsono sehingga bisa maju melalui Gerindra tidak terlepas dari campur tangan Pak Idham dan incumbent, pada saat Pak Harsono mengikuti tes di DPP PDIP untuk maju sebagai calon bupati dari PDIP yang bertindak sebagai tim penyeleksi adalah Pak Idham sehingga dari hasil wawancara dsbnya menurut analisis Pak Idham tetap akan kalah jika melawan incumbent sehingga Pak Idham melakukan upaya untuk mendorong agar Pak Harsono maju melalui Gerindra karena dari sisi apapun Pak Harsono tidak mungkin menang jika melawan incumbent”

Alasan kedua, restu yang diberikan oleh kader-kader PDIP pro perubahan, tidak dapat dipungkiri bahwa yang pertama kali membuka komunikasi dengan Suharsono terkait penjangkaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul adalah kader-kader PDIP pro perubahan. Alasan kader-kader PDIP pro perubahan memberikan restu kepada Suharsono karena keinginan kader-kader PDIP pro perubahan adalah memutus rezim Drs.H. Idham Samawi sehingga tidak ada pilihan lain selain terus berjalan mendukung Suharsono walaupun berada diluar sistem, Karena proses pemenangan Suharsono secara *de jure* sudah dikoordinatori oleh tim pemenangan

⁶ Wawancara penulis dengan Rajut Sukasworo ketua Suharsono Center

yang berasal dari partai pengusung Suharsono. Alasan *ketiga*, berasal dari keinginan dan tekad yang kuat dari Suharsono untuk mewujudkan misi yang tertunda pada tahun 2010 untuk menjadi Bupati Bantul dengan mengambil kesempatan turut serta dalam Pemilu Pilkada Bantul 2015 serta memutus rezim yang sudah berkuasa selama 15 tahun untuk menghadirkan kehidupan demokrasi yang sehat di Bantul.

Dinamika proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tidak hanya di alami oleh PDIP sendiri, pergolakan dan gesekan politik yang memunculkan ketidakharmonisan di internal Koalisi Merah Putih di Bantul turut mewarnai proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021. Hal ini bermula ketika timbul perpecahan didalam Koalisi Merah Putih, perpecahan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih disebabkan faktor kekecewaan dan merasa di khianati. Tiga partai yang memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih adalah Golkar, PPP, dan PAN.

Sikap politik Golkar dan PPP secara struktural bersepakat mendukung Petahana meliputi 2 faktor, faktor *pertama* yang mendasari pilihan kedua partai politik tersebut mendukung petahana dikarenakan kecewa terhadap partai Gerindra dan PKS kekecewaan yang lahir didasari oleh permufakatan Partai Gerindra, PKB dan PKS dalam pendaftaran Harsono-Halim sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, *kedua* berdasarkan *lobby* politik yang dilakukan Golkar dan PPP secara struktural melihat hal yang lebih menjanjikan

ketika mendukung petahana, hal ini menunjukkan terjadinya kekisruhan di internal Koalisi Merah Putih.

Selanjutnya sebuah fenomena bentuk ekspresi kekecewaan lain justru di tunjukkan oleh PAN, pada Pemilu Pilkada Bantul 2015 PAN secara struktural bersikap abstain dalam Pemilu Pilkada. Makna abstain yang dimaksudkan adalah sikap struktural PAN untuk tidak mengusung salah satu Pasangan Calon secara struktural dan kewenangan kepartaian untuk sementara di berhentikan, akan tetapi hal ini tidak secara otomatis menginstruksikan kepada kader-kader PAN untuk GOLPUT akan tetapi kader-kader PAN dipersilahkan menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani, pada hakekatnya PAN tidak membenarkan sikap GOLPUT karena hal tersebut melanggar Undang-Undang. Seperti kutipan wawancara penulis dengan ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Bantul seperti dibawah ini ⁷ :

“Abstain yang kami maksudkan secara kelembagaan partai PAN pada Pilkada ini tidak mengusung siapapun dan kewenangan kepartai sementara kita off kan, kami mempersilahkan kepada kader-kader untuk menentukan pilihan secara personal berdasar hat nurani masing-masing, yang pada intinya harus di ingat PAN tidak mengajak dan mengajarkan untuk Golput karena melanggar UU”

Sikap abstain DPD PAN Bantul sebagai sikap protes dan bentuk kekecewaan terhadap Partai Gerindra, PKS dan PKB karena tidak melibatkan PAN dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa alasan PAN mengambil sikap politik abstain, *pertama* karena kecewa dan merasa di telikung oleh Gerindra dan PKS. Kekecewaan PAN bermula sejak mulai terlihatnya sebuah sikap dan gerak-gerik

⁷ Wawancara penulis dengan Mahmud Ardi Widanto Ketua DPD PAN Bantul

bahwa Partai Gerindra, PKS dan PKB akan mendaftarkan Harsono-Halim pada saat-saat terakhir pada hari terakhir pendaftaran, sedangkan kesepakatan yang dibuat bersama oleh Koalisi Merah Putih adalah jika tidak ada calon penantang petahana opsi yang dimunculkan adalah pendaftaran calon akan di perpanjang selama 3 hari akan tetapi realitanya Partai Gerindra, PKB dan PKS mendaftarkan Pasangan Calon Harsono-Halim pada saat 2 Jam sebelum penutupan pendaftaran hal ini yang menimbulkan reaksi kemarahan dan kekecewaan PAN karena secara matematis tidak mungkin melengkapi syarat-syarat administratif termasuk mengurus surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PAN dengan kurun waktu selama 2 jam. Hal tersebut juga yang menjadi pertimbangan Partai Golkar yang pada saat itu memiliki dualisme kepengurusan, sehingga syarat sahnya Partai Golkar dapat mengusung ketika kedua kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat Golkar memunculkan calon yang sama.

Alasan *kedua*, PAN tidak mungkin memunculkan calon alternatif ketiga karena akan menguntungkan petahana, sejatinya PAN secara kelembagaan dan keinginan di tataran kader serta jargon yang sering dikumandangkan adalah perubahan di Bantul, hal ini bermaksud untuk menghentikan rezim petahana yang sudah memimpin Bantul selama 15 tahun, sejarah mencatat pada 2010 PAN mengusung petahana namun dalam menjalankan roda pemerintahan petahana dianggap melakukan banyak korupsi sehingga tidak sesuai dengan Visi dan Misi PAN sehingga pada tahun 2015 PAN dipastikan tidak akan kembali mengusung petahana. Apabila PAN menghadirkan

sosok calon alternatif baru akan menjadi tidak *ideal* jika menginginkan perubahan, karena suara akan terpecah dan menguntungkan petahana sehingga kemungkinan terjadinya perubahan kepemimpinan di Bantul akan semakin kecil.

Alasan *ketiga* PAN memilih abstain sosok calon yang yang berkompetisi pada Pemilu 2015 belum memiliki Visi-Misi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Bantul sehingga hal ini dipandang PAN hanya sebagai perebutan tahta lembaga eksekutif di Bantul, dari Kacamata PAN penantang petahana yakni Pasangan Calon Harsono-Halim tidak diyakini oleh PAN mampu menang jika melawan petahana hal ini didasari oleh Harsono-Halim tidak memiliki program yang jelas untuk mewujudkan perubahan, semangat yang dikobarkan hanya perubahan dan pergantian rezim dengan menyebarluaskan keburukan-keburukan petahana seperti petahana melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN yang berbunyi ;

“kemarin kita gak yakin harsano-halim mampu mengalahkan petahana karena kita anggap bahwa mereka tidak memiliki program yang jelas untuk melakukan perubahan jika terpilih, hal yang dikobarkan hanya petahana itu korupsi , petahana itu kolusi dsbnya”

Alasan *keempat*, sikap abstain dipandang menguntungkan PAN karena pada realitasnya PAN walaupun secara kelembagaan abstain akan tetapi komunikasi politik dengan kedua Pasangan Calon yang berkompetisi terus terjaga dan PAN memiliki komitmen siapapun Pasangan Calon yang mendapat amanah dari rakyat Bantul PAN akan mendukung kebijakan dan program yang berpihak pada rakyat. Sejatinya PAN

memiliki kebimbangan dan tidak ingin berada di luar pemerintahan, sikap politik dua kaki ini menjadi bahan pertimbangan PAN bahwa dengan sikap abstain PAN akan mendapat keuntungan tanpa harus memperdulikan pemenang Pemilu 2015 di Bantul.

Berdasarkan empat alasan diatas menurut Dewan Pimpinan Daerah PAN secara struktural memilih sikap abstain secara kelembagaan merupakan sikap terbaik dan terhormat yang dapat dilakukan PAN pada Pemilu 2015, posisi PAN secara kelembagaan dalam situasi yang dilematis, di satu sisi tidak mungkin mendukung petahana karena PAN merupakan salah satu pencetus perubahan kepemimpinan di Bantul kemudian di sisi lainnya kekecewaan terhadap anggota Koalisi Merah Putih di Bantul mendorong PAN untuk kembali merapat ke Koalisi Merah Putih secara kelembagaan, bahkan PAN di tingkat daerah sampai tingkat nasional sudah keluar dari koalisi merah putih. Sikap Dewan Pimpinan Daerah PAN yang abstain memunculkan kekecewaan sampai kepada tataran Kader PAN, hal ini yang menjadi latar belakang utama munculnya gerakan membentuk relawan untuk memenangkan Suharsono, relawan tersebut dinamakan Gerbong Biru yang akan dijelaskan secara lebih komperhensif pada sub pembahasan berikutnya.

B. Partisipasi Kelompok-Kelompok Relawan (Jas Merah dan Gebong Biru)

1. Jas Merah

Kemenangan pasangan Harsono-Halim dalam merebut hati rakyat Bantul pada Pemilu 2015 tidak dapat dipungkiri berasal dari perpecahan di dalam internal PDIP Bantul. Hal utama yang menjadi sorotan mengacu kepada perbedaan pandangan kader-kader PDIP Bantul terkait dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati, perbedaan tersebut menempatkan PDIP Bantul menjelang Pemilu memiliki dua kubu yang bersebrangan yakni kubu pro petahana dan pro perubahan. Aspek politis yang menyebabkan kader-kader PDIP yang menginginkan dicalonkannya petahana kembali adalah berdasarkan prestasi petahana dan anggapan bahwa tidak ada kader atau figur yang lebih baik dari petahana sedangkan disisi lain kader-kader pro perubahan beranggapan bahwa harus ada pemutusan rezim petahana karena partai mulai bergantung pada sosok figur yakni Drs.H. Idham Samawi serta kader-kader pro perubahan tidak sepatutnya jika kepentingan partai di nomor duakan setelah kepentingan pribadi petahana.

Perbedaan dan pergolakan di internal PDIP semakin menguat dan mengalami titik puncak ketika rekomendasi DPP PDIP menurunkan rekomendasinya kepada petahana sedangkan disisi lain nama yang paling banyak mendapat suara dan mayoritas di inginkan kader-kader PDIP adalah Suharsono, dalam menyikapi hal tersebut kader-kader PDIP pro perubahan melakukan sebuah konsolidasi dengan Suharsono membahas terkait langkah dan strategi yang akan dilakukan pasca

turunnya surat rekomendasi tersebut, terdapat beberapa opsi seperti kemungkinan untuk Suharsono maju melalui jalur independen dan memulai pembicaraan dan lobby politik dengan partai politik lain yang sempat tertunda dan dihentikan sementara.

Berkaitan dengan opsi *pertama* untuk mendorong Suharsono agar melalui jalur independen terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, terdapat dua hal yang menjadi alasan fundamental opsi pertama ini tidak dijalankan dan setuju alasan pertama berkaitan dengan kekuatan Suharsono jika terpilih di parlemen, tidak dapat dipungkiri bahwa jabatan kepala pemerintahan adalah jabatan yang bersifat politis sehingga peranan dan dukungan dari lembaga Legislatif menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan publik, tanpa dukungan dari partai politik yang memiliki suara di Legislatif akan menyulitkan Suharsono dalam membangun stabilitas pemerintahan karena stabilitas pemerintahan dapat terjadi jika Eksekutif dan Legislatif dapat berjalan berdampingan.

Alasan *kedua* yang menjadi alasan dasar tidak melanjutkan opsi pertama ini adalah dari segi biaya, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan apabila terdapat calon kepala daerah yang berkeinginan untuk maju lewat jalur independen di haruskan mengumpulkan Karta Tanda Penduduk di wilayah yang akan di ikuti Pemilukada pada konteks penelitian kali ini tentu Kartu Tanda Penduduk yang harus dikumpulkan adalah Kartu Tanda Penduduk masyarakat Bantul. Berikut data jumlah penduduk Bantul berdasarkan jenis kelamin ;

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Srandakan	14.340	14.595	28.935
2.	Sanden	14.690	15.249	29.939
3.	Kretek	14.375	15.249	29.939
4.	Pundong	15.678	16.419	32.097
5.	Bambanglipuro	18.705	19.216	37.921
6.	Pandak	24.229	24.329	48.558
7.	Bantul	30.455	30.889	61.344
8.	Jetis	26.500	27.092	53.592
9.	Imogiri	28.472	29.062	57.534
10.	Dlingo	17.825	18.340	36.165
11.	Pleret	22.697	22.619	45.316
12.	Piyungan	25.937	26.219	52.156
13.	Banguntapan	66.636	64.948	131.584
14.	Sewon	55.784	54.571	110.355
15.	Kasihan	59.712	59.559	119.271
16.	Pajangan	17.906	17.371	34.467
17.	Sedayu	22.741	23.211	45.952
	Jumlah	475.872	479.143	955.015
	Presentase	49,83	50,17	100

Sumber : www.bantul.go.id

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 955.015 jiwa, jika di merujuk kepada Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 pada pasal 41 ayat 2 c disebutkan bahwa ;

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen)”

Pasal ini menjelaskan syarat minimal dukungan, jika pada saat tersebut pilihan Suharsono untuk maju menjadi calon Bupati Bantul melalui jalur perseorangan pencalonan Suharsono akan dianggap sah jika mampu mengumpulkan jumlah

dukungan berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku sebanyak 68.506 dukungan, hal ini merupakan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bantul Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 Tentang Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dari Pasangan Calon Perseorangan, berdasarkan kalkulasi jumlah syarat minimal dukungan tersebut Suharsono bersama kader-kader PDIP pro perubahan mengurungkan niat maju melalui jalur independen karena sejatinya Suharsono tidak memiliki sumber daya dibidang keuangan dengan jumlah yang melimpah , ini berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang berbunyi ⁸ ;

“bahkan sempat kita dorong untuk maju melalui independen hanya saja jika hitung-hitungan biaya juga terlalu banyak, karena harus mengumpulkan syarat minimal KTP dan hal tersebut tentu membutuhkan dana yang besar ”

Berdasarkan dua pertimbangan diatas Suharsono bersama kader-kader PDIP lebih menyetujui jika Suharsono maju sebagai Calon Bupati Bantul melalui partai politik lain, kemudian pembicaraan dan *lobby* yang sempat tertunda dengan Koalisi Merah Putih, setelah melalui proses panjang akhirnya sampai pada kesepakatan politik bahwa Suharsono akan di usung oleh Partai Gerindra, PKB dan PKS yang akan di sandingkan dengan Abdul Halim Muslih sebagai Calon Wakil Bupati. Kesepakatan ini memunculkan kekecewaan dan kebahagiaan di tataran kader PDIP pro perubahan, sisi kekecewaan dilatar belakangi majunya Suharsono sebagai calon Bupati Bantul bukan berasal dari PDIP jika dilihat dari sejarahnya kader-kader PDIP

⁸ Wawancara penulis dengan Rajut Sukasworo ketua Suharsono Center

yang memiliki jasa besar dalam kemunculan dan peningkatan elektabilitas Suharsono akan tetapi sisi kebahagiaan yang dirasakan adalah Kabupaten Bantul semakin dekat dengan perubahan dengan jatuhnya rezim petahana, hal ini merupakan tujuan utama kader-kader PDIP pro perubahan sehingga majunya Suharsono dalam Pemilu Bantul 2015 tidak melihat partai pengusung Suharsono namun cara pandang yang terbentuk adalah peruntukan dan pergantian rezim petahana karena hal ini merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar.

Proses kelahiran Jas Merah tentu tidak dapat mengesampingkan realita bahwa Suharsono akan maju sebagai calon Bupati bukan melalui partai PDIP, sehingga hal ini akan menempatkan posisi yang sulit dan dilematis bagi kader-kader PDIP pro perubahan, latarbelakang lahirnya Jas Merah di dasari 4 faktor utama, *pertama* pembentukan Jas Merah sebagai bentuk komitmen kader-kader pro perubahan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Bantul pada umumnya dan kader-kader PDIP pada khususnya, yang menginginkan sebuah perubahan kepemimpinan, keinginan akan perubahan ini disebabkan 3 hal yang cukup mempengaruhi pilihan masyarakat bantul :

1. Petahana melakukan pembentukan rezim dilembaga eksekutif kemudian pada realitanya dengan adanya rezim yang sudah ciptakan selama 15 tahun memunculkan sebuah sikap arogan.
2. Terbongkarnya beberapa kasus korupsi yang dilakukan keluarga petahana dan muncul kepermukaan dan diketahui oleh publik secara luas dan yang paling menyita perhatian korupsi dana hibah Persatuan Sepakbola Bantul

(PERSIBA) yang dilakukan oleh Drs. H. Idham Samawi walaupun pada akhirnya yang bersangkutan dinyatakan tak bersalah dan sudah dibersihkan dari tuduhan-tuduhan tersebut.

3. Kehidupan demokrasi di Bantul tidak tumbuh secara subur dan sehat hal ini dikarenakan ketidakberdayaan aktor-aktor politik lain diluar keluarga Drs. H Idham Samawi

Faktor *kedua*, kader-kader PDIP pro perubahan berusaha menyelamatkan Partai dari cara pandang masyarakat yang mulai cenderung menganggap PDIP merupakan partai yang serakah akan kekuasaan dan menyelamatkan citra PDIP di tataran partai-partai politik lain yang ada di Bantul. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, jargon PDIP sebagai partai yang revolusioner dan berpihak kepada masyarakat kecil mulai diragukan kapasitasnya dikarenakan PDIP tidak pernah melahirkan gagasan perubahan dalam pengambilan kebijakan publik, hal ini tentu dikarenakan selama 15 tahun kepemimpinan eksekutif di Bantul hanya bergantung kepada sosok figur Drs. H. Idham Samawi.

Bukan hal yang mengejutkan ketika Bantul tidak memiliki inovasi baru dalam mensejahterakan masyarakat karena sumber pengambil kebijakan selama ini adalah orang yang sama, kemudian sebagai anti tesis dari cara pandang partai-partai politik yang ada di Bantul kader-kader pro perubahan bertujuan menepis tuduhan bahwa PDIP Bantul berkembang dan menjadi partai besar bukan karena sosok Drs. H Idham Samawi seorang diri, pembuktian tersebut dilakukan dengan cara menunjukkan eksistensi, kapasitas dan komepetensi kader-kader PDIP pada Pemilukada 2015 yang

bertujuan ingin menunjukkan bahwa PDIP Bantul tidak bergantung kepada sosok Drs. H Idham Samawi.

Ketiga, posisi dan status kader-kader PDIP pro perubahan masih sebagai kader PDIP sehingga tidak mungkin akan masuk kedalam internal partai politik lain diluar PDIP hal ini tentu dapat dipahami karena terlepas dari dinamika internal PDIP Bantul dalam hati dan ideologis yang masih terus dipegang teguh oleh kader-kader PDIP pro perubahan adalah sebuah kebanggaan menjadi kader PDIP dan hal tersebut tidak bisa hilang dan dibatasi oleh waktu dan kondisi apapun dalam analogi lain dapat disebutkan jiwa raga tetap PDIP bahkan diakui atau tidak diakui bagi kader-kader pro perubahan PDIP harga mati. Hal ini yang kemudian menunjukkan bahwa militansi kader-kader PDIP yang ada di Bantul tidak dapat di pandang sebelah mata hal ini terbukti dengan 3 periode kepemimpinan eksekutif di Bantul sejak era reformasi PDIP selalu ditempatkan sebagai Partai Pemenang.

Berkesinambungan dengan pemaparan sebelumnya bahwa proses persiapan Suharsono sebagai calon bupati Bantul yang akan diusung PDIP secara politis menjadi sia-sia jika ditinjau dari perjuangan yang dimulai sejak awal oleh kader-kader pro perubahan yang mengusahakan dan menacari sosok ideal penantang petahana, proses yang sia-sia ini merujuk kepada keadaan yang mengharuskan kader-kader PDIP pro perubahan menarik diri dari internal koalisi Suharsono dan meninggalkan *Suharsono Center* yang sudah diciptakan dan desain sebagai salah satu sumber politik dalam kemenangan Suharsono terutama teruntuk untuk menaikkan elektabilitas Suharsono.

Suharsono Center merupakan sebuah embrio lahirnya semangat dan optimisme masyarakat yang sudah jenuh akan rezim petahana, akan tetapi pasca ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul bahwa Suharsono maju sebagai Calon Bupati dari koalisi merah putih Gerindra, PKS, dan PKB secara otomatis kader-kader PDIP pro perubahan meninggalkan *Suharsono Center* dan melanjutkan perjuangan diluar sistem, hal tersebut wajar terjadi mengingat tujuan kader-kader PDIP pro perubahan adalah peruntuhan rezim petahana bukan membelot atau keluar dari PDIP sehingga hal ini yang menjadi alasan terbentuknya Relawan Jas Merah yang dengan konsisten tetap mendukung Suharsono.

Faktor *keempat*, kader-kader pro perubahan ingin membuktikan dan menunjukkan kepada pihak penguasa dan partai bahwa keputusan yang tidak diambil atas dasar aspirasi mayoritas kader-kader internal merupakan kesalahan dan tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena akan melemahkan partai secara perlahan dengan terbelenggunya kepentingan-kepentingan partai demi terwujudnya kepentingan suatu golongan.

Setelah fase tersebut babak baru kader-kader PDIP pro perubahan di mulai dengan melahirkan sebuah gerakan baru yakni membentuk sebuah komunitas yang berjudul relawan dan menamakan diri Jas Merah. Sejak saat tersebut kader-kader PDIP yang memiliki tujuan menghentikan dinasti politik dan memutus rezim keluarga Drs. Idham Samawi memiliki rumah baru dalam melanjutkan perjuangan walaupun harus menerima kenyataan yang sulit ketika dianggap sebagai pemberontak dan pembelot oleh sebagian kader-kader pro petahana di struktural Dewan Pimpinan

Cabang PDIP Bantul.

Anggapan sebagai pemberontak tersebut di berikan kepada kader-kader pro perubahan dengan dilandasi dua tuduhan *pertama*, proses pembentukan Jas merah dianggap sebagai bentuk eskpresi kekecewaan karena kehilangan jabatan dalam kepengurusan kepartaian terutama di tingkat kecamatan (Pengurus Anak Cabang), tuduhan ini didasarkan pada saat tahun 2015 terjadi proses pemilihan kepengurusan baru dan kader-kader pro perubahan tidak kembali masuk dalam kepengurusan pada periode 2015-2020, hal tersebut di yakini sebagai alasan kader-kader PDIP pro perubahan membentuk Jas Merah dalam rangka mempertahankan eksistensi.

Tuduhan *kedua* adalah yang dituduhkan adalah terdapat oknum yang terdidik dan terstruktur diluar partai politik menggunakan cara *divide et empera* atau politik adu domba di internal kader-kader PDIP Bantul dengan mengedepankan materialisme sebagai imbalan. Hal ini seperti kutipan wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang berbunyi ⁹ :

“pada bulan November-Desember 2014 ada proses pemilihan pengurus kemudian mereka tidak terpilih lagi kemudian kecewa dan ketika kecewa mendeklarasikan jas merah itu, jadi apa yang menjadi dasar mereka mendeklarasikan itu bukan prinsip ideologis tapi kekecewaan hati , saya yakini bahwa ada oknum dibalik itu semua secara masif dan terstruktur serta terdidik untuk melemahkan kami dari dalam dengan mengedepankan aspek materialisme”

Cobaan yang dialami oleh kader-kader pro perubahan tidak sampai pada tuduhan dan anggapan sebagai pengkianat akan tetapi berlanjut dari disingkirkannya kader-kader pro perubahan tersebut dalam struktural kepartaian baik di Dewan

⁹ Wawancara Penulis dengan Ariyunadi Ketua DPC PDIP Bantul

Pimpinan Cabang sampai dengan Pengurus Anak Cabang, hal ini dikarenakan kader-kader pro perubahan yang berhasil menghimpun aspirasi dari tataran bawah sebelum penjarangan bakal calon PDIP Bantul secara resmi digelar dituduhkan menyuarakan sebuah keanehan dan memanfaatkan posisinya sebagai Pengurus Anak Cabang.

Keanehan yang dimaksudkan adalah kader-kader pro perubahan memunculkan calon baru yang tidak pernah terlibat dalam pemerintahan di Bantul dan tidak dikenal oleh masyarakat Bantul untuk kemudian dicalonkan oleh kader-kader pro perubahan tersebut melalui pintu-pintu Pengurus Anak Cabang, berdasarkan sikap politik yang diambil oleh kader-kader pro perubahan pada akhirnya harus di bayar dengan disingkirkan dari kepengurusan kepartaian secara struktural. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang berbunyi ¹⁰ :

“sebelum pilkada di internal PDIP terdapat konfercab untuk penentuan pengurus DPC yang baru pada saat tersebut adalah saat sibuk-sibuknya memasuki penjarangan bakal calon dan kita berlawanan dengan pak idham, dari semua teman-teman yang mengusulkan calon ketua DPC yang berasal dari sebrang keinginan pak idham tidak mendapatkan rekomendasi sehingga kami disingkirkan secara halus”

Hal ini diperkuat dengan salah satu narasumber penulis yang sekarang menjabat sebagai ketua Jas Merah yang berbunyi ¹¹ :

“saya periode sebelumnya adalah ketua PAC PDIP kecamatan imogiri, akan tetapi pada saat pemilihan kepengurusan baru kami disingkirkan dari kepartaian semenjak proses penjarangan calon bupati dan wakil bupati kami bersebrangan dengan Pak Idham”

¹⁰ Wawancara penulis dengan Rajut Sukasworo Ketua Suharsono Center

¹¹ Wawancara Penulis dengan Heru Jaka Widada Ketua Jas Merah

Kedua hasil petikan wawancara diatas menunjukkan bahwa keterlibatan Drs. H Idham Samawi begitu kuat dalam proses penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan di usung oleh PDIP Bantul, ini dibuktikan dengan tersisihnya kader-kader PDIP yang bersebrangan kepentingan dengan Drs. H. Idham Samawi dengan cara melemahkan eksistensi dan mengucilkan kader-kader PDIP yang bersebrangan tersebut dari aktivitas kepartaian.

Berdasarkan ketidakadilan yang diterima oleh kader-kader PDIP pro perubahan yang dilakukan oleh Drs. H Idham Samawi beserta pengikutnya memacu kader-kader PDIP pro perubahan merumuskan sebuah nama yang bertujuan mengkritik dan mengingatkan kepada Drs. H Idham Samawi dan pengikutnya bahwa keberhasilan PDIP menjadi partai pemenang pemilu selama 3 periode berturut-berturut sejak tahun 1999-2010 di Bantul tidak dapat dilupakan bahwa ada peranan dan kontribusi besar yang diberikan oleh kader-kader PDIP yang pada saat itu menginginkan perubahan.

Proses pemilihan nama Jas Merah bukan tanpa alasan dan memiliki makna filosofi yang mendalam, nama Jas Merah di pilih karena sesuai dengan tujuan dan realita yang ada di internal kader-kader PDIP Bantul pada saat itu, nama Jas Merah diambil dari pidato terakhir Presiden pertama Republik Indonesia yakni Ir.Soekarno pada tahun 1966 yang memiliki kepanjangan “Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah” , maksud yang ingin disampaikan dalam nama Jas Merah adalah berkaitan dengan isu yang digulirkan kepada publik oleh kader-kader PDIP pro petahana bahwa siapapun yang menolak keputusan partai adalah pengkhianat dan pembangkang serta

akan diberikan sanksi tegas secara kepartaian.

Hal ini yang kemudian memunculkan reaksi ketidakpuasan dikalangan kader-kader PDIP pro perubahan, pemberian status pengkianat dan pembangkang kepada kader-kader pro perubahan oleh kader-kader pro petahana merupakan dianggap sebagai sebuah kesalahan, karena perubahan yang mereka perjuangkan adalah hasil dari aspirasi dan keinginan masyarakat Bantul beserta kader-kader PDIP di tataran bawah, selain itu pengambilan nama Jas Merah ditujukan oleh kader-kader pro perubahan kepada kader-kader pro petahana bahwa selama ini kader-kader pro perubahan memiliki loyalitas yang tidak dapat diukur dengan materi terhadap PDIP dan memberikan kontribusi penting dalam memperjuangkan kepentingan partai dan membesarkan PDIP di Bantul, hal ini sudah berlangsung sejak era reformasi.

Sikap kekecewaan terhadap partai dikarenakan perjuangan dan loyalitas kader-kader PDIP pro perubahan terhadap partai tidak pernah dihargai dan dipertimbangkan, maksud dari bentuk menghargai yang di inginkan oleh kader-kader PDIP pro perubahan adalah bahwa partai harus menjamin dan memberikan hak yang sama bagi setiap kader-kader PDIP di Bantul dengan mengedepankan kepentingan partai dibandingkan dengan kepentingan golongan, hak yang dimaksud adalah hak untuk bersuara dan menyampaikan aspirasi yang selama ini jarang sekali terakomodir oleh partai karena selalu di hadapkan dengan kepentingan golongan atau bahkan individu serta sejatinya partai harus responsif dalam mengakomodir keinginan masyarakat Bantul yakni pergantian pemimpin.

Melalui Jas Merah ini kader-kader pro perubahan ingin menunjukkan kepada

Pengurus PDIP dari tingkat Kabupaten, Provinsi sampai Pusat bahwa PDIP merupakan partai demokrasi dengan pengambilan keputusan tertinggi sesuai dengan aspirasi terbanyak atau musyawarah mufakat dan mengedepankan aspirasi rakyat sebagai landasan perjuangan. Pembentukan Jas Merah tidak dapat dipungkiri untuk memberikan wadah baru dalam rangka mengakomodir kepentingan kader-kader PDIP dalam rangka memenangkan Suharsono, Jas Merah merupakan kelanjutan dari *Suharsono Center* yang pada saat itu diketuai oleh Rajut Sukasworo. Suharsono Center memiliki cakupan yang luas karena setiap elemen dapat bergabung kedalam *Suharsono Center* hal akan dikhawatirkan menimbulkan gesekan dengan partai secara struktural jika berafiliasi dengan partai politik lain oleh sebab itu hadir wadah baru bernama Jas Merah yang diketuai oleh Heru Jaka Widada.

Perpindahan dari *Suharsono Center* ke Jas Merah tidak dapat dilepaskan dari peranan besar beberapa kader-kader PDIP yang turut berperan dalam menyuarakan perubahan dan mencari sosok calon pemimpin Bantul sebagai penantang petahana, mereka adalah Rajut Sukasworo, Sutanto Nugroho, Yulianto, Basuki Rahmat, dan Heru Jaka Widada. Pada hakekatnya terbentuknya Jas Merah merupakan buah kerja keras yang dilakukan oleh semua kader-kader PDIP di Bantul dari tataran Dewan Pimpinan Cabang, Pengurus Anak Cabang sampai pada Pengurus Ranting serta hal ini diperkuat oleh di dapatnya dukungan dari sebagian kader-kader senior PDIP di Bantul.

Dukungan terhadap perubahan belum berhenti sampai disitu, faktanya beberapa anggota dewan dari fraksi PDIP jika berdasarkan hati nurani menginginkan

perubahan akan tetapi karena sedang menjabat sebagai anggota dewan tidak terlalu lantang menyuarakan perubahan karena jika hal tersebut dilakukan bukan tidak mungkin akan terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW). Sehingga yang membedakan ke lima tokoh diatas dengan seluruh kader-kader PDIP yang pro perubahan adalah dari sisi peranan dan ketokohan yang lebih besar banyak proporsinya serta tidak dapat dikesampingkan ke lima tokoh diatas memiliki posisi yang strategis dalam menyuarakan perlawanan terbuka terhadap kader-kader Pro perubahan.

Dari sisi keanggotaan Jas Merah tidak melakukan rekrutmen karena kader-kader PDIP dengan suka rela bergabung hal ini tentu tidak berdasarkan mayoritas Pengurus Ranting di tingkat desa dari 75 ranting 55 menyatakan dukungan terhadap perubahan dan Pengurus Anak Cabang dari 17 kecamatan 14 mendukung Suharsono sehingga yang menjadi mesin politik Jas Merah adalah kader-kader PDIP, Jas Merah berbeda dengan *Suharsono Center* karena dalam ke anggotaan Jas Merah semua murni berasal dari kader-kader PDIP dan simpatisan PDIP.

Pembentukan Jas Merah tentu memiliki tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai secara garis besar tujuan tersebut adalah memenangkan Harsono-Halim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021. Namun secara lebih spesifik tujuan terbentuknya Jas Merah terbagi kedalam beberapa hal yakni, *satu* untuk memberikan wadah bagi kader-kader PDIP yang mengharuskan partai melakukan perubahan dan perubahan tersebut dimaksudkan pada perubahan kepemimpinan yang artinya mayoritas kader-kader PDIP tidak lagi menginginkan petahana atau keluarga petahana kembali maju sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul dari

PDIP.

Tokoh-tokoh penggerak Jas Merah membaca keadaan ini secara baik dan tepat karena jika tidak ada konsep perubahan yang ditawarkan oleh partai, peluang kemunduran PDIP Bantul sangat besar, hal ini dikarenakan kader-kader PDIP yang menginginkan perubahan akan lari dari partai dan partai politik lain yang melihat peluang ini akan memanfaatkan untuk merekrut kader-kader PDIP yang kecewa kepada Struktural Dewan Pimpinan Cabang berkaitan hilangnya nuansa demokratis di internal PDIP jika selalu mengkultuskan dan menokohkan salah satu figur serta akan menjadi kerugian terbesar yang akan diterima oleh PDIP jika kehilangan mesin-politiknya pada Pemilihan Presiden 2019 karena kader-kader PDIP ditataran bawah tidak diperdulikan dan dihargai aspirasinya.

Tujuan *kedua*, menjatuhkan rezim Drs. Idham Samawi dengan harapan demokrasi akan tumbuh di bantul dan menyelamatkan muka partai bahwa partai ini tidak mendukung adanya dinasti. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan utama hadirnya Jas Merah dikarenakan untuk mengakomodir suatu gagasan akan perubahan di Bantul, tugas pertama sudah berhasil dilaksanakan yakni memunculkan calon penantang bagi petahana walaupun terdapat kegagalan karena penantang petahana tidak di usung oleh PDIP. Tugas kedua adalah bagaimana mengarahkan dan menumbuhkan semangat kepada kader-kader PDIP dan masyarakat Bantul yang mengharapkan perubahan dan pergantian kepemimpinan, hal ini penting dilakukan karena jika masyarakat tidak melakukan langkah nyata untuk perubahan maka perubahan kepemimpinan di Bantul hanya akan sebatas impian.

Langkah nyata yang dilakukan untuk mensukseskan tujuan kedua ini adalah Jas Merah memberikan sosialisasi dan mengajak seluruh konstituen dalam hal ini rakyat Bantul untuk tidak menjadi golongan putih (GOLPUT) dan tidak memilih petahana kembali apapun tawaran politik yang ditawarkan bahkan ketika tawaran politik yang diberikan berupa politik transaksional, jika masyarakat tergiur akan tawaran politik transaksional atau memilih untuk GOLPUT maka sudah dipastikan petahana akan kembali menang dan jika petahana kembali menang demokrasi di Bantul tidak akan berkembang.

Isu di tataran internal Jas Merah untuk GOLPUT sudah menguat, hal ini ditengarai tidak mungkin memilih incumbent karena mengharapkan perubahan sedangkan disisi yang lain ketika memilih Harsono-Halim artinya tidak mengikuti instruksi partai dan hal yang paling tidak di inginkan di tataran internal Jas Merah adalah Bupati Bantul periode 2016-2021 bukan berasal dari PDIP, kondisi ini membuat Jas Merah dalam keadaan yang penuh polemik. Akan tetapi jika massa Jas Merah memilih GOLPUT sedangkan massa petahana memilih maka kemenangan sudah pasti berada di pihak petahana.

Melalui pertimbangan bahwa partai sudah tidak lagi mengedepankan aspirasi-aspirasi kader sementara secara struktural 14 Pengurus Anak Cabang yang merasa dikhianati dan diabaikan oleh partai berkaitan dengan aspirasinya merapatkan barisan untuk melawan ketidakadilan yang terjadi, kekecewaan ini dilandaskan oleh partai yang tidak lagi mengedepankan demokrasi tetapi sudah ingin membentuk sebuah rezim yang dipimpin oleh salah satu tokoh saja sehingga dengan tekad yang lurus dan

berkeyakinan bahwa keinginan perubahan ini merupakan aspirasi masyarakat Bantul Jas Merah tidak mengendurkan semangat untuk mendukung Harsono-Halim dan tetap memobilisasi konstituen untuk mendukung dan memilih Harsono-Halim pada Pemilu 2015 dalam keadaan apapun, konsekuensi yang diterima secara langsung adalah Jas Merah di isukan akan di usulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang untuk dilakukan pemecatan akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi pilihan Jas Merah dalam menentukan sikap politik untuk mendukung Harsono-Halim.

Tekad dan keyakinan bahwa Bantul membutuhkan perubahan ditunjukkan melalui menjelang hari pencoblosan apapun bentuk Suharsono bahkan sampai ada oknum yang memberikan informasi keburukan Suharsono kepada internal Jas Merah sudah tidak lagi diperdulikan sampai pada tingkatan paling ekstrem isu yang dihembuskan kompetitor Suharsono bahwa Suharsono menggerakkan instansi kepolisian akan tetapi hal tersebut tidak di hiraukan oleh internal Jas Merah sebab Jas Merah yang melakukan manuver politik mencari massa sehingga isu tersebut dipastikan sebuah kebohongan, hal ini tertuang dalam wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang berbunyi ¹² :

“Isu yang dihembuskan dari pihak incumbent pak harsono menggerakkan kepolisian namun sekali lagi saya tekankan bahwa faktor utama Pak Har menang karena masyarakat sudah jenuh dengan kepemimpinan incumbent”

Prinsip perubahan yang sudah dipegang teguh adalah petahana tidak boleh kembali menang, sehingga pada saat itu tidak lagi ada rasa kekecewaan terhadap Suharsono apapun bentuk Suharsono diterima dan bahkan dari tataran internal Jas

¹² Wawancara Penulis dengan Rajut Sukasworo Ketua Suharsono Center

Merah juga belum meyakini Suharsono akan lebih baik dalam memimpin Bantul dikarenakan Suharsono tidak memiliki latar belakang politisi dan tidak menetap di Bantul akan tetapi pergantian rezim dan pemutusan rezim merupakan suatu keharusan karena demokrasi harus tumbuh di Bantul dan demokrasi harus berjalan di PDIP pada khususnya sehingga permasalahan kemampuan dan pengetahuan Suharsono yang dianggap kurang memadai dalam memimpin Bantul dapat diatasi dengan belajar dan berjuang bersama rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan salah satu narasumber seperti dibawah ini ¹³ :

“fokus kami adalah pemutusan rezim, jadi pada saat itu kami menutup mata siapapun calonnya. Tujuan kami memutus rezim kepemimpinan idham samawi, masalah bupatinya bodoh bisa belajar , masalah bupatinya keliru bisa di ingatkan yang penting rezim terputus dan pada akhirnya pelan-pelan kita benahi bantul bersama”

Tujuan *ketiga*, kehadiran Jas Merah merupakan perwujudan bentuk perlawanan kader-kader PDIP kepada Drs. H Idham Samawi bahwa keputusan tertinggi berasal dari suara mayoritas kader bukan berasal dari tataran elit partai saja, munculnya perlawanan ini tidak dapat dilepaskan karena pengambilan keputusan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh PDIP tidak berdasarkan aspirasi kader-kader secara mayoritas. Penulis membagi bentuk perlawanan Jas Merah kedalam dua bagian , bagian pertama perlawanan terbuka dan bagian kedua perlawanan tertutup.

Perlawanan terbuka merupakan bentuk wujud protes yang disebabkan adanya dominasi yang diciptakan sehingga memunculkan kelas-kelas sosial, wujud

¹³ Wawancara Penulis dengan Basuki Rahmat Pendiri Jas Merah

perlawanan terbuka diekspresikan dengan langkah nyata dan bersifat revolusioner yang berorientasi mengubah sistem yang ada tanpa memperdulikan kepentingan pribadi, pada penelitian ini penulis menemukan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kader-kader PDIP di Bantul berkaitan dengan proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021 dan penulis membagi perlawanan terbuka tersebut kedalam 3 tindakan revolusioner yang dilakukan demi mengubah sistem.

Wujud perlawanan terbuka yang *pertama*, menolak mengikuti Instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDIP terkait pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada Pemilu 2015 dan mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi kompetitor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang di usung PDIP, penolakan ini berdasarkan hasil keputusan bersama bahwa Dewan Pimpinan Pusat tidak mendengar suara dari akar rumput kader-kader PDIP di Bantul sehingga kader-kader PDIP di Bantul tidak memiliki keterikatan secara ideologis terhadap keputusan partai yang diambil secara sepihak, bentuk perlawanan ini di tuntaskan pada hari pencoblosan dengan menolak GOLPUT dan memberikan suara kepada pasangan Harsono-Halim. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang berbunyi ¹⁴ :

“bentuk perlawanan yang kita lakukan adalah dengan memilih bukan incumbent dan tidak GOLPUT agar incumbent tidak jadi lagi”

Wujud perlawanan terbuka yang *Kedua* yakni, membentuk Relawan Jas Merah dalam rangka menghimpun aspirasi dan kepentingan kader-kader PDIP yang

¹⁴ Wawancara Penulis dengan Rajut Sukasworo ketua Suharsono Center

menginginkan perubahan serta turut serta dalam mengkampanyekan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Harsono-Halim baik dalam kampanye terbuka maupun kampanye tertutup. Keberadaan Jas Merah dalam menggalang dukungan kepada Harsono-Halim tidak dapat dipandang sebelah mata hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Jas Merah mengambil suara petahana sebanyak 30 persen dari total suara yang di dapat petahana pada Pemilu pada 2010, hal ini dibuktikan pada Pemilu pada 2010 petahana memiliki suara 70 % sedangkan pada Pemilu pada 2015 petahana hanya mendapat suara 47 % keberhasilan ini dapat diraih dikarenakan anggota Jas Merah menunjukkan kesolidan dan kesungguhan dalam mengkampanyekan Harsono-Halim pada puncaknya Relawan Jas Merah mampu mengumpulkan massa sebanyak 3000 orang pada saat kampanye terbuka pasangan Harsono-Halim sebelum menjelang hari tenang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pendiri Jas Merah yang berbunyi ¹⁵ :

“gebrakan terakhir yang kita buat Jas Merah pada saat kampanye terbuka pak Har bisa mengumpulkan masa 3000 lebih, dan hal ini memunculkan kemarahan pak idham pada saat rapat koordinasi dengan tim sukses”

Hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul menyatakan bahwa Harsono-Halim unggul dari pasangan Ida-Munir dengan selisih 5 % suara , menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber bahwa Jumlah suara yang dapat dibawa oleh Jas merah sekitar 30.000 orang sedangkan selisih suara

¹⁵ Wawancara penulis dengan Sutanto Nugroho pendiri Jas Merah

27.735 suara adalah massa dari Jas Merah. Ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang berbunyi ¹⁶ :

“Kita sampaikan ke Pak Har bahwa kita bisa membawa masa sekitar 30.000 orang dan selisih suara hampir mencapai 28.000 suara jadi hitungan-hitungan kita selisih suara tersebut adalah masa real jas merah”

Target Jas Merah dalam meraih 30.000 suara sesuai dengan target yang ditetapkan bahwa target Jas Merah akan merebut suara sebesar 30.000-40.000 dari total 130.000 suara yang dimiliki PDIP pada pemilihan Legislatif tahun 2014. Hal ini tertuang pada hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang menyatakan seperti dibawah ini ¹⁷ :

“selisih kemenangan Pak Har dari Bu Idham sebesar 5 % yakni masa real jas merah, karena pengitungan kita kita dapat mengumpulkan suara sebesar 30.000-40.000 suara dari total suara yang didapat PDIP pada saat pileg lalu yakni sebesar 130.000 suara ”

Wujud perlawanan terbuka yang *ketiga* adalah pendeklarasian dukungan secara terbuka dihadapan publik dan media bahwa Relawan Jas Merah mendukung Harsono-Halim pada H-10 pencoblosan Pemiluakada Bantul 2015, pasca Suharsono maju diusung partai politik lain diluar PDIP Suharsono dan Jas Merah sudah memiliki kesepakatan bahwa Jas Merah akan mendukung Suharsono diluar sistem yang berarti tidak akan berkomunikasi dengan tim pemenangan Suharsono namun akan berkoordinasi langsung dengan Suharsono selain itu Jas Merah tidak secara terburu-buru mendeklarasikan dukungan secara terbuka karena akan memudahkan petahana

¹⁶ Wawancara penulis dengan Sutanto Nugroho pendiri Jas Merah

¹⁷ Wawancara penulis dengan Rajut Sukasworo ketua Suharsono Center

dalam membaca strategi , sampai pada H-10 pencoblosan Jas Merah masih menggunakan perjuangan dibawah tanah dan gerilya sehingga tidak terlihat di permukaan hal ini di anggap menguntungkan dikarenakan menciptakan suasana nyaman di kubu petahana dan tim suksesnya ternyata hal tersebut berhasil membuat kondisi di tataran tim sukses petahana panik, kepanikan tersebut juga menjalar kepada Drs. H Idham Samawi.

Bentuk kepanikan yang ditunjukkan oleh Drs. H Idham Samawi yakni pada hari tenang Drs. H Idham Samawi turun langsung mencari dukungan dengan wujud pembagian beasiswa oleh Drs.H Idham Samawi selaku ketua DPR-MPR yang diperuntukkan bagi 3500 untuk pelajar di Bantul, hal ini menurut sudut pandang Jas Merah sebuah pelanggaran karena sudah memasuki hari tenang jika yang menjadi calon Bupati bukan merupakan istri dari Drs. H Idham Samawi tidak menjadi persoalan dan hal yang menjadi persoalan adalah pada saat momen tersebut merupakan hari tenang yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu narasumber penulis yang berbunyi ¹⁸ :

“Kami dari Jas merah belum bergerak secara terbuka masih bergerak bergerilya dibawah tanah sehingga tidak terlihat, pada saat kami deklarasi h-10 sebelum pemilihan Pak Idham panik dan sudah pesimis karena tidak lagi bisa mengejar, bahkan kepanikan Pak Idham terlihat ketika pak idham dengan kedok memberikan beasiswa sebanyak 3500 pelajar yang ada dibantul dalam kapasitasnya sebagai ketua DPR-MPR, hal ini dikarenakan beliau sudah santai

¹⁸ Wawancara penulis dengan Basuki Rahmat Pendiri Jas Merah

dan yakin menang akan tetapi ketika kami deklarasi terjadi kepanikan karena jumlah masa jas merah yang begitu besar”

Perlawanan tertutup merupakan perlawanan dengan berorientasi menolak sistem dan bertujuan untuk menyampaikan kepada pihak penguasa akan ketidakpuasan terhadap kebijakan penguasa dan tidak bersifat revolusioner. Pada penelitian kali ini penulis membagi kedalam dua hal bentuk perlawanan tertutup yang dilakukan oleh Jas Merah, wujud *pertama* adalah Jas Merah menutup akses komunikasi dengan partai penguasa dan fokus pada pemenangan Harsono-Halim bersama parta-partai pengusung dan relawan penantang petahana, hal ini dilakukan dikarenakan terdapat usaha dari Drs. H Idham Samawi melalui orang-orang kepercayaannya untuk melakukan intimidasi secara halus kepada kader-kader PDIP yang bergabung dalam Jas Merah.

Intimidasi tersebut berupa bentuk ancaman akan dikeluarkan dari pekerjaan yang dikuasi oleh pihak petahana seperti BUMD, PDAM dan lain-lain yang bersangkutan dengan usaha milik daerah, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan perjuangan kader-kader PDIP di dalam memperjuangkan tujuan Jas Merah yakni meruntuhkan rezim Drs. H Idham Samawi, keberanian tersebut dikarenakan kader-kader PDIP dalam internal Jas Merah tidak bergantung kepada Drs. H Idham Samawi sehingga partai atau Drs. H Idham Samawi tidak bisa membatasi dan menghalangi Jas Merah mengikuti hati nurani. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang berbunyi ¹⁹ :

¹⁹ Wawancara penulis dengan Basuki Rahmat pendiri Jas Merah

“komunikasi kami terputus dengan Pak Idham, akan tetapi h-1 minggu sebelum pencoblosan saya ditemui orang suruhan pak idham untuk menghadap tapi saya katakan saya akan menghadap setelah pilkada saja, karena memang ada usaha intimidasi yang dilakukan oleh Pak Idham”

Wujud perlawanan secara tertutup yang *kedua* adalah Tidak menggunakan atribut berupa lambang, bendera dan pakaian dari partai pengusung petahana dalam hal ini tentu atribut PDIP dan lebih memilih menggunakan atribut lain yang di anggap netral. Hal ini sebagai bentuk kami tidak menggunakan kebesaran nama partai untuk mendulang suara bagi Suharsono kami menggunakan nama JasMerah dan atribut Jas Merah berupa kaos kerah bertuliskan Jas Merah walaupun secara *de facto* anggota Jas Merah semua adalah kader-kader PDIP, hal ini kami lakukan karena kami tidak ingin menciptakan perpecahan yang lebih dalam di internal PDIP Bantul sehingga kami memutuskan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak secara struktural kepartaian tapi bergerak sebagai relawan Harsono-Halim.

Tujuan *keempat* hadirnya Jas Merah adalah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa PDIP melalui kader-kadernya tidak hanya mengabdikan kepada partai saja namun juga mengabdikan kepada masyarakat, hal kedua bahwa Jas Merah ingin menunjukkan bahwa sloga keberpihakan PDIP terhadap *wong cilik* bukan hanya sekedar kata-kata semata akan tetapi hal tersebut merupakan sebuah kebenaran dan kepercayaan yang di implementasikan secara nyata, dan wujud pengabdian tersebut dengan cara memberikan dan menghadirkan sosok pemimpin yang baru untuk perubahan Bantul.

Tujuan *kelima* Jas Merah mendukung Harsono-Halim adalah menjadi

penghubung antara pemerintah dengan konstituen PDIP, jabatan pimpinan eksekutif yakni Bupati dan Wakil Bupati adalah jabatan politis, sehingga pasti akan mempertimbangkan dan mengedepankan aspek-aspek politis secara formal hal ini tidak dapat dibenarkan tapi secara informal hal ini terjadi dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat sehingga diakui atau tidak realita tersebut sudah menjadi rahasia publik.

Ketika jabatan politis Bupati dan Wakil Bupati bukan berasal dari PDIP maka secara otomatis hal-hal yang bersifat bantuan sosial dan ekonomi akan sulit diakses oleh konstituen PDIP analogi yang harus dibangun ketika terdapat dua kepentingan yang sama dan berasal dari kelompok yang berbeda maka kepentingan yang didahulukan tentu adalah kepentingan kelompok yang tidak bersebrangan dan mendukung Bupati dan Wakil Bupati pada saat pencalonan. Posisi Jas Merah untuk memastikan bahwa aspirasi, kepentingan dan kebutuhan konstituen PDIP tetap terakomodir walaupun jabatan politis di tataran eksekutif tidak di duduki oleh internal PDIP, serta selain itu Jas Merah bertanggung jawab melanjutkan dan mengawal dukungan konstituen PDIP yang pada Pemilu 2014 mendukung Harsono-Halim hal ini agar dukungan tersebut tidak terputus di tengah jalan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber²⁰ :

“bupati adalah jabatan politis sehingga pasti mengedepankan aspek politis juga, secara formal tidak dapat disampaikan tetapi secara informal dan kenyataan hal itu terjadi”

²⁰ Wawancara Penulis dengan Basuki Rahmat Pendiri Jas Merah

Kemenangan Suharsono pada Pemilu tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Jas Merah melakukan proses marketing politik dalam meraih dukungan masyarakat, berdasarkan kesepakatan yang tercapai antara Jas Merah dan Suharsono mengenai posisi Jas Merah dalam koalisi Harsono-Halim yakni berada di luar koalisi namun pada saat kampanye terbuka pasangan calon Harsono-Halim Jas Merah bergabung dengan keseluruhan pendukung Harsono-Halim yang terdiri dari partai-partai politik, relawan dan organisasi masyarakat.

Maksud dari posisi Jas merah diluar koalisi adalah Jas Merah tidak mengikuti koridor tim pemenangan pasangan calon Harsono-Halim menyebabkan komunikasi yang dilakukan Jas Merah langsung kepada Suharsono, pada prosesnya perumusan strategi pemenangan yang dilakukan Jas Merah tidak melibatkan tim pemenangan Harsono-Halim dan dalam proses pengimplementasian strategi Jas Merah tetap tidak melibatkan tim pemenangan Harsono-Halim.

Terdapat beberapa Strategi yang dilakukan Jas Merah dalam proses marketing politik Suharsono yang *pertama*, menciptakan jargon politik yang mudah diterima masyarakat dan berdasarkan realita strategi ini merupakan strategi yang tidak disangka dan diluar perkiraan tim sukses petahana karena dengan mudah dapat diterima masyarakat dan mempengaruhi pilihan masyarakat Bantul, strategi penyampaian jargon ini melalui tokoh-tokoh masyarakat serta dengan cara terjun langsung mengetuk pintu-pintu rumah masyarakat atau dalam bahasa lain kampanye yang dilakukan *door to door*, Jargon politik yang disampaikan dikemas dengan

sebuah kalimat “Mari Bergerak Bangkitkan Perubahan” untuk memudahkan masyarakat memahami maksud kalimat tersebut tersebut Jas Merah merinci alasan-alasan untuk mendukung pasangan calon Harsono-Halim yang terbagi ke dalam tiga poin diantaranya;

Satu, Pembentukan dinasti politik oleh Keluarga Drs. H Idham Samawi, isu yang dilemparkan oleh Jas Merah pada saat kampanye adalah Drs. H Idham Samawi yang merupakan suami petahana dan bupati Bantul 2 periode sebelum petahana sudah menciptakan dinasti politik di Bantul, hal ini menyebabkan masyarakat Bantul tidak memiliki pilihan dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati, karena sudah selama 20 tahun sejak era reformasi Drs. H Idham Samawi beserta keluarganya memimpin Bantul, sehingga Jas Merah dalam kampanyenya mengajak masyarakat untuk menghentikan rezim Drs. H Idham Samawi agar dinasti politik Drs. H Idham Samawi tidak terlalu mengakar dengan cara tidak lagi memilih petahana dalam Pemilu 2015, Hal yang disampaikan Jas Merah untuk memperteguh keyakinan masyarakat Bantul adalah jika petahana kembali menang maka Pemilu Bantul selanjutnya tidak akan ada calon Bupati dan Wakil Bupati lain muncul tetapi akan kembali berasal dari keluarga Drs. H Idham Samawi.

Poin kedua, Petahana beserta keluarganya melakukan tindakan korupsi. Sorotan utama yang disampaikan Jas Merah saat kampanye adalah mengenai kasus korupsi yang menyangkut Drs. H Idham Samawi kasus ini salah satu kasus korupsi yang paling menyita perhatian masyarakat karena muncul kepermukaan, hal ini terjadi saat

Drs. H Idham Samawi menjabat sebagai Bupati Bantul periode 2005-2010, kasus yang disangkakan adalah korupsi dana hibah PERSIBA Bantul hal ini menunjukkan bahwa petahana dan keluarganya tidak lagi memegang teguh prinsip yang sering dikumandangkan yakni bersih dan berpihak kepada rakyat, kasus korupsi yang menyangkut Idham Samawi merupakan bukti bahwa petahana dan keluarganya sudah tidak layak dan tidak dapat dipercaya kembali untuk mengemban amanah rakyat Bantul.

Poin *ketiga*, Jas Merah mengajak masyarakat untuk memilih Putra Daerah asli Bantul sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantul, sosok putera Daerah yang menjadi fokus kelebihan Harsono-Halim dibaca dengan baik oleh Jas Merah untuk mempengaruhi pemilih dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki sentiment kedaerah yang kuat hal ini dikarenakan Harsono-Halim merupakan putera asli Bantul sedangkan Petahana baik Sri Surya Widati atau Drs. H Idham Samawi merupakan produk impor dari luar Bantul, Drs. H Idham Samawi berasal dari Padang dan masuk Kabupaten Bantul menggunakan Kartu Tanda Penduduk Kota Jogja pada tahun 1999. Hal ini yang menjadi poin penting Jas Merah dalam kampanyenya menyuarakan bahwa Bantul memiliki sosok putra daerah asli yang memiliki keinginan, kemampuan dan loyalitas untuk memimpin Bantul karena Bantul merupakan tanah kelahiran dari dua sosok pasangan calon yakni Harsono-Halim.

Keberhasilan Jas Merah merumuskan strategi kampanye dengan mengangkat isu berupa perubahan dianggap merupakan salah satu keberhasilan yang

menyebabkan petahana kalah, hal ini diakui oleh ketua Relawan Gerbong yang berasal dari kader partai PAN. Diakui oleh ketua Relawan Gerbong Biru secara matematis akan sulit mengalahkan petahana karena sudah memimpin sejak 1999 akan tetapi isu perubahan yang dikemas dan diusung oleh pasangan calon Harsono-Halim dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat dan ditunjang dengan penyampaian isu perubahan yang secara masif menambah poin penting dalam keberhasilan Harsono-Halim menumbangkan rezim petahana. Hal ini seperti tertuang dalam wawancara penulis dengan ketua Gerbong Biru yang berbunyi ²¹ :

“sebenarnya dalam hitung-hitungan politis tidak mungkin nomor 1 menang karena begitu kuatnya petahana, tapi memang isu perubahan yang diusung oleh nomor satu secara masif disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat dengan mudah menerima hal tersebut”

Strategi *kedua* yang dilakukan oleh Jas Merah dalam memenangkan harsono Halim adalah menjalankan mesin politik dari tataran Dusun, Desa , Kecamatan sampai Kabupaten untuk bergerak. Pasca membentuk 3 kalimat propaganda yang dapat diterima masyarakat dan berdasarkan realita Jas Merah melakukan tindakan mobilisasi masa selama periode kampanye, mobilisasi ini terstruktur dan masif karena itikad akan perubahan muncul dari semua elemen masyarakat kekuatan yang terhimpun untuk menumbangkan petahana berdasarkan semangat juang dan bertarung sampai titik darah penghabisan, mesin politik Jas Merah memiliki kekuatan yang luar biasa karena mendapat sambutan antusias dari masyarakat akan sebuah perubahan sehingga ketika masyarakat yang berada diluar sistem antusias menyambut perubahan

²¹ Wawancara Penulis dengan Janan Sarjito Ketua Gerbong Biru

maka internal Jas Merah yang berada di dalam sistem dan mengetahui kondisi yang tidak ideal di internal tentu memiliki antusias yang luar biasa.

Strategi *ketiga* yang digunakan adalah melakukan kampanye dengan gerilya agar tidak terdeteksi oleh tim sukses petahana dan khususnya oleh Drs. H Idham Samawi, hal ini dilakukan berdasarkan 3 faktor utama yakni ;

1. Mempertimbangkan aspek kekuatan dan nama besar Drs. H Idham Samawi di Bantul, ketika Jas Merah bergerak secara terbuka sedari awal maka sudah dapat dipastikan bahwa Drs. H Idham Samawi akan menekan dan mencoba menggagalkan usaha Jas Merah dalam melakukan manuver politik mencari dukungan untuk pasangan Harsono-Halim.
2. Meminimalisir gesekan dengan kader-kader PDIP yang pro petahana, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar perpecahan PDIP tidak terus meruncing dan dapat mengganggu stabilitas partai pasca Pemiluakada, pertimbangan Jas Merah tidak menginginkan gesekan dan konflik yang lebih jauh dikarenakan tujuan pemutusan rezim Drs. H Idham Samawi dimaksudkan agar demokrasi di PDIP Bantul bisa tumbuh.
3. Pergerakan di bawah tanah yang dilakukan oleh Jas Merah ditujukan untuk memberikan rasa nyaman dan kepercayaan diri kepada tim sukses petahana, realita yang terjadi tim sukses petahana menunjukkan sikap arogansi dan keyakinan penuh bahwa petahana akan kembali menang kendati tim sukses

petahan tidak melakukan sosialisasi dan kampanye. Sikap arogansi tersebut yang dimanfaatkan oleh Jas Merah untuk bergerak mencuri hati masyarakat dengan meyakinkan masyarakat melalui jargon-jargon yang sudah dirumuskan diatas.

Strategi *terakhir* adalah terus menciptakan sikap tidak berpuas diri agar semangat juang semakin hari semakin meningkat, hal ini dilakukan agar semua Tim pemenangan tidak bersantai dan mencurahkan total fokusnya dalam rangka memenangkan Suharsono, tidak berhenti pada internal Jas Merah saja akan tetapi semangat tidak berpuas diri ini juga ditularkan kepada pasangan calon Harsono-Halim, hal ini dilakukan ketika Jas Merah pasangan calon yakni Harsono-Halim melakukan konsolidasi dan evaluasi pada setiap pertemuan, laporan yang dilampirkan dan disampaikan oleh Jas Merah kepada pasangan calon bahwa suara yang didapat pasangan calon selalu di bawah 50 persen di setiap kecamatan. Hal ini bertujuan agar menjadi pemicu semangat dan menjaga kerendahan hati serta menajuhkan keangkuhan dari pasangan calon bersama partai pengusung, sehingga pasangan calon terus bekerja keras dan bertarung sampai akhir. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang berbunyi ²² :

“strategi kita saat berkonsolidasi dengan paslon selalu kita sampaikan suara paslon pasti dibawah 50 persen maksud kita adalah itu menjadi cambuk dan penyemangat agar paslon tidak somnong dan terus bekerja keras sampai akhir”

²² Wawancara Penulis dengan Basuki Rahmat pendiri Jas Merah

Konsistensi Jas Merah dalam mewujudkan perubahan kepemimpinan tidak berhenti pada mengantar Suhasono sebagai Bupati Bantul periode 2016-2021 akan tetapi Jas Merah pasca Pemilukada tetap mengawal kebijakan dan memberikan kritik jika terdapat kekeliruan dalam pengambilan kebijakan serta Jas Merah tetap menaruh mosi percaya dan dukungan kepada pemerintahan Suharsono hal tersebut dilakukan melalui komunikasi bertatap muka langsung dan komunikasi jarak jauh dengan fasilitas teknologi seperti SMS, Telfon atau Sosial Media yang dapat dilakukan atas nama pribadi dari internal Jas Merah atau melalui Jas Merah secara struktural hal ini dilakukan karena Jas Merah sudah memiliki kontrak politik dengan Suharsono akan mengawal sampai akhir periode dan Jas Merah memiliki tanggung jawab moral kepada rakyat Bantul karena sudah memunculkan Suharsono pada Pemilukada.

Dukungan kader-kader PDIP yang tergabung dalam Jas Merah mendapat konsekuensi munculnya isu pemecatan sebagai kader PDIP dikarenakan membangkang dan tidak mengikuti instruksi partai, akan tetapi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga PDIP bahwa yang berhak melakukan pemecatan adalah ketua umum PDIP yang dibahas melalui kongres, bentuk sah sebuah pemecatan adalah penarikan Kartu Tanda Anggota partai yang dimiliki setelah 1 tahun berjalan tidak ada surat resmi yang dapat ditunjukkan oleh partai mengenai pemecatan dan tidak ada penarikan Kartu Tanda Anggota partai untuk kader-kader PDIP yang tergabung dalam Jas Merah, munculnya isu pemecatan dikarenakan Jas Merah melakukan pers rilis dihadapan media dengan

mendeklarasikan mendukung Harsono-Halim dan mempertanyakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang tidak mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan mayoritas aspirasi kader-kader PDIP di Bantul.

Kebenaran isu pemecatan ini dibernarkan oleh kader-kader PDIP yang tergabung dalam Jas Merah akan tetapi konfirmasi yang diberikan adalah pemecatan yang ditujukan kepada kader-kader PDIP di internal Jas Merah merupakan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang dibawah pimpinan Ariyunadi, hal tersebut dikonfirmasi bahwa Dewan Pimpinan Cabang sudah mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP untuk memberikan sanksi berta berupa pemecatan karena tidak mengikuti instruksi partai yang berjumlah 13-17 orang akan tetapi surat pemecatan tersebut tidak di publikasikan karena hanya akan membuat gaduh. Hal ini tertuang dalam petikan wawancara penulis dengan ketua Dewan Pimpina Cabang PDIP²³ :

“kami sudah usulkan ke DPP untuk diberikan sanksi berat berupa pemecatan, kenapa harus pemecatan karena pilkada ini event negara dan siapapun yang tidak taat terhadap intruksi partai tidak kata lain selain pemecatan, nama yang kami usulkan 13-17 nama saya juga lupa persisnya tapi yang punya kewenangan untuk itu adalah DPP”

Menanggapi isu tersebut kader-kader PDIP di Jas Merah langsung bergerak cepat mencari kebenaran isu yang disampaikan oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul dengan cara menemui ketua Dewan Pimpinan Daerah yang memiliki wewenang di tingkat Provinsi, akan tetapi hasil yang didapat adalah tidak ada surat

²³ Wawancara Penulis dengan Ariyunadi ketua DPC PDIP Bantul

pemecatan yang dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, hal yang disampaikan oleh ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP DIY konflik Pemilukada Bantul hanya berada ditataran Bantul dan hal tersebut merupakan usulan dari Dewan Pimpinan Cabang dibawah kepengurusan Ariyunadi hal tersebut dilakukan karena ada segelintir oknum yang ingin mencari simpatik dari Drs. H Idham Samawi, sehingga dapat berdasarkan kenyataan diatas tidak ada pemecatan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat kepada kader-kader PDIP yang berada di Jas Merah kemudian hal ini diperkuat dengan tidak ada penarikan Kartu Tanda Anggota yang dilakukan oleh partai.

2. Gerbong Biru

Pada Pemilukada 2015 di Kabupaten Bantul tidak hanya memunculkan polemik dan perpecahan di internal partai pemenang pemilu yakni PDIP, akan tetapi terdapat satu partai yang di internalnya juga mengalami perbedaan sikap politik sehingga memunculkan suatu gerakan baru yang ditujukan untuk memenangkan Harsono-Halim dalam rangka menciptakan perubahan bagi Kabupaten Bantul, partai tersebut adalah PAN. Sikap politik PAN menyambut Pemilukada Bantul 2015 menimbulkan kekecewaan di tataran kader-kader PAN, hal ini dikarenakan PAN yang memiliki kursi sebanyak 6 di parlemen tidak memiliki daya tawar dihadapan pasangan calon berdasarkan hal tersebut kader-kader PAN dibawah komando Janan Sarjito membentuk sebuah relawan yang bernama Gerbong Biru dengan tujuan memenangkan Harsono-Halim demi perubahan di Kabupaten Bantul.

Kelahiran Gerbong Biru dalam kontestasi Pemilukada Bantul sudah dijelaskan

di sub bagian sebelumnya bahwa hal ini disebabkan beberapa faktor akan tetapi faktor utamanya adalah kekecewaan kader-kader PAN yang mendukung perubahan dalam hal ini sepakat ingin memutus rezim Idham Samawi akan tetapi justru sikap yang diambil partai secara struktural tidak memihak penantang petahana walaupun ada pertimbangan politis dan ketidaksolidan koalisi merah putih di Bantul, terlepas dari aspek politis tersebut kader-kader PAN memandang bahwa jika kader-kader PAN dan kosntituen PAN tidak diarahkan karena partai tidak memiliki sikap atau abstain akan menjadi *swing voters* dan menjadi massa yang mengambang.

Keadaan tersebut yang kemudian disadari oleh kader-kader PAN dibawah komando Janan Sarjito untuk menentukan sikap demi mengakomodir konstituen PAN pada Pemilihan Legislatif 2014 lalu, sikap yang diambil adalah mendukung pasangan calon Harsono-Halim guna memutus rezim Drs. H Idham Samawi, keberanian kader-kader PAN bukan tanpa sebab ini dikarenakan sebelum muncul instruksi partai bahwa PAN akan abstain jauh sebelum itu PAN merupakan salah satu partai yang mewacanakan dan mendukung adanya perubahan karena rezim Drs. H Idham Samawi sudah terlalu lama dan sudah menjenuhkan.

Faktor *kedua* yang menjadi latar belakang lahirnya Gerbong Biru adalah mayoritas pengurus PAN di tingkat kecamatan memberikan dukungan agar kader-kader PAN turut serta mensukseskan perubahan meskipun tidak melalui PAN, dari 17 Dewan Pengurus Cabang PAN yang ada dibantul sebanyak 15 Dewan Pengurus Cabang di tingkat kecamatan sepakat untuk mensukseskan Harsono-Halim, berdasarkan aspirasi tersebut bebrapa kader PAN dibawah komando Janan Sarjito

membentuk sebuah wadah yang diperuntukkan untuk menampung aspirasi dan sebagai lahan perjuangan kader-kader PAN pada Pemilkada 2015. Berikut daftar secara terperinci dari Dewan Pengurus Cabang PAN dalam menyatakan dukungan kepada Harsono-Halim ;

Tabel 3.5

Hasil Aspirasi Dewan Pengurus Cabang PAN terkait dukungan terhadap Pasangan Calon Harsono-Halim

No	Kecamatan	Keputusan DPC
1	Bantul	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
2	Sewon	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
3	Banguntapan	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
4	Piyungan	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
5	Imogiri	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
6	Pleret	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
7	Dlingo	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
8	Jetis	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
9	Bambanglipuro	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
10	Pundong	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
11	Kretek	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
12	Sanden	Abstain
13	Pandak	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
14	Srandakan	Abstain
15	Pajangan	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
16	Kasihani	Sepakat Mendukung Harsono-Halim
17	Sedayu	Sepakat Mendukung Harsono-Halim

Sumber : Relawan Gerbong Biru 2015

Berdasarkan data diatas secara mayoritas Dewan Pimpinan Cabang PAN Bantul sepakat menyuarkan perubahan, sedangkan 2 kecamatan yang memilih abstain adalah Sanden dan Srandakan dikarenakan tetap patuh dan mengikuti instruksi partai, pasca penjaringan tersebut Janan Sarjito bersama beberapa kader PAN mencoba untuk menjelaskan kepada Dewan Pimpinan Cabang PAN di kecamatan Sanden dan

Srandakan bahwa instruksi Partai adalah secara struktural partai abstain tetapi tidak menginstruksikan kader-kader PAN untuk tidak memilih hanya saja pada Pemilu 2015 partai membebaskan kader-kader PAN untuk memilih sesuai hati nurani akan tetapi setelah melakukan proses *lobby* kedua Dewan Pimpinan Cabang tersebut tetap memutuskan untuk abstain mengikuti sikap Dewan Pimpinan Daerah PAN Bantul.

Faktor *ketiga* yang menjadi dasar terbentuknya Gerbong Biru dan mengalokasikan dukungan kepada Harsono-Halim adalah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah PAN Bantul, persetujuan yang diberikan Dewan Pimpinan Daerah PAN Bantul didasari bahwa struktural partai tidak menginstruksikan kader-kader PAN untuk GOLPUT dan membebaskan kader-kader PAN menentukan pilihan berdasarkan hati nurani, sikap abstain partai hanya berdampak pada tidak di aktifkannya hak dan administrasi kepartaian pada Pemilu 2015.

Pada kesempatan ini Janan Sarjito yang selaku ketua Gerbong Biru menghadap kepada ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Bantul yakni Mahmud Ardi Widanto untuk menjelaskan maksud dan posisi Gerbong Biru pada Pemilu pada kesempatan tersebut pokok pembicaraan adalah menjelaskan alasan dan posisi gerbong biru hanya sebatas relawan pasangan calon Harsono-Halim, setelah melalui pembicaraan yang cukup panjang akhirnya Gerbong Biru mendapatkan izin bersyarat dari Dewan Pimpinan Daerah PAN Bantul untuk membentuk gerbong biru dan mendukung paslon Harsono-Halim. Izin bersyarat yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah PAN Bantul meliputi 4 hal :

1. Gerbong Biru tidak di izinkan menggunakan atribut PAN, berupa lambang partai, bendera partai dan seragam partai. Hal ini disebabkan posisi PAN secara struktural abstain.
2. Gerbong Biru tidak diperkenankan memobilisasi kader-kader PAN untuk mendukung salah satu calon dengan membawa struktural, Dewan Pimpinan Daerah mengizinkan setiap kader-kader PAN menentukan pilihan berdasarkan hati nurani.
3. Tidak ada kontrak politik yang boleh dilakukan oleh Gerbong Biru kepada masing-masing calon kecuali hanya bertujuan mensukseskan pasangan calon menjadi Bupati dan Wakil Bupati
4. Pasca Pemiluakada Gerbong Biru tidak diperkenankan melakukan konsolidasi apapun terlepas siapapun pemenang dalam Pemiluakada

Faktor *keempat* yang menjadi dasar Gerbong Biru lahir dan mendukung paangan calon selain petahana adalah dukungan yang didapat dari tokoh-tokoh penting PAN yakni Amien Rais dan Hanafi Rais, komunikasi yang dibangun oleh kader-kader PAN yang menjadi anggota Gerbong Biru pasca mengetahui sikap politis yang diambil oleh Dewan Pimpinan Daerah PAN Bantul adalah abstain kader-kader PAN melalui Janan Sarjito melakukan komunikasi dengan Amien Rais dan Hanafi Rais dan suara serta aspirasi yang diusung oleh kader-kader PAN yang menginginkan perubahan mendapat persetujuan dari dua tokoh diatas karena kedua tokoh diatas memiliki ide yang sejalan dengan kader-kader PAN bahwa Bantul butuh perubahan, berkat dorongan dan dukungan yang diberikan kedua tokoh penting di internal PAN

semakin menguatkan tekad dan optimisme kader-kader PAN dalam mendukung selain petahana.

Hal ini merujuk pada salah satu petikan wawancara penulis dengan ketua Gerbong Biru²⁴ :

“pada saat itu kader-kader PAN memberanikan diri untuk mendukung selain petahana karena hal tersebut se ide dengan mohon maaf pak amien rais dan mas hanafi rais, jadi setelah kami komunikasikan pak amien dan mas hanafi secara pribadi memang inginnya ada perubahan di Bantul sehingga kami memberanikan mendukung paslon yang bukan petahana”

Faktor *kelima* lahirnya Gerbong Biru manuver politik yang dilakukan Suharsono dalam menghimpun dan memobilisasi kader-kader PAN, pada saat Suharsno dan Halim dinyatakan resmi maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul dengan didukung 3 partai politik yakni Gerindra, PKB dan PKS Suharsono mengetahui bahwa koalisi merah putih di Bantul tidak solid sehingga PAN yang semula bersepakat untuk berkoalisi memilih untuk abstain, pergerakan awal Suharsono menemui Janan Sarjito dan beberapa kader PAN untuk membicarakan terkait posisi dan dukungan kader-kader PAN pada Pemilukada 2015, melalui proses *lobby* dan kuatnya dorongan akan perubahan kader-kader PAN yang di pimpin oleh Janan Sarjito menyepakati sebuah kontrak politik bahwa kader-kader PAN akan memebentuk relawan dalam rangka memenangkan Harsono-Halim.

Keberhasilan proses *lobby* yang dilakukan Suharsono terdapat 2 faktor utama yang menjadi sebabnya, *pertama* keinginan kuat kader-kader PAN akan sebuah perubahan merupakan hal yang tidak bisa disembunyikan dan hadirnya sosok

²⁴ Wawancara Penulis dengan Janan Sarjito Ketua Gerbong Biru

Suharsono merupakan jawaban dan sebuah harapan baru bagi kader-kader PAN yang sudah jenuh dengan kepemimpinan rezim Drs. H Idham Samawi, alasan *kedua* jauh sebelum Suharsono menjadi Calon Bupati Bantul periode 2016-2021 Suharsono sudah melakukan pembicaraan kepada Janan Sarjito, hal ini dilakukan 6 bulan sebelum Pemilukada. Akan tetapi pada saat tersebut pembicaraan Suharsono dan Janan Sarjito baru sebatas menyampaikan maksud bahwa terdapat kemungkinan Suharsono akan maju sebagai Calon Bupati Bantul periode 2016-2021 untuk itu pada kesempatan itu Suharsono meminta Janan Sarjito bersama kader-kader PAN agar mendukung pencalonan Suharsono apabila nanti Suharsono menjadi Calon Bupati Bantul. Hal ini tertuang pada wawancara penulis dengan ketua Gerbong Biru yang berbunyi²⁵ :

“saya pribadi sudah dihubungi oleh pak harsono sekitar 6 bulan sebelum pilkada tapi pada saat itu pembicaraan kami hanya sekedar saya kerumah beliau ngomong-ngomong berdua begitu saja. Artinya belum diminta untuk menjadi kadernya, hanya sebatas pak har menyampaikan ingin maju dan visi misinya seperti ini jadi seolah member sinyal berkeinginan untuk maju pada pilkada besok”

Kecermatan Suaharsono membaca peta politik internal PAN menjadi salah satu faktor kemenangan Suharsono pada Pemilukada 2015, berdasarkan data yang didapat penulis bahwa tim sukses petahana turut melakukan komunikasi kepada Gerbong biru melalui Janan Sarjito. Komunikasi tersebut tidak serta merta langsung diputuskan oleh Janan Sarjito namun dimusyawarahkan bersama kader-kader PAN lain dan pada akhirnya mencapai kata sepakat pada saat hal tersebut disosialisasikan dan

²⁵ Wawancara Penulis dengan Janan Sarjito Ketua Gerbong Biru

disampaikan kepada kader-kader PAN hasil keputusan musyawarah menginginkan bahwa gerbong biru tetap mendukung selain petahana. Hal ini dibuktikan dari total 50.000 ribu suara fraksi PAN pada saat pileg , sebanyak 90 % suara konstituen PAN mengarah kepada Suharsono. Hal ini didapat penulis dari hasil wawancara dengan ketua Gerbong Biru yang berbunyi ²⁶ :

“Kalo kemarin yang mendukung paslon no 1 setelah saya dan teman-teman melihat laporan dari hampir setiap kantong PAN pasti menang, kita bisa bedakan misalnya kelurahan-kelurahan yang menjadi kantong PAN menang, jadi kalkulasinya saya bisa katakan dari 100 persen ya 90 persen suara PAN pada pileg lari ke pak paslon no 1”

Pada proses marketing politik pada umumnya gerbong biru memiliki strategi yang hampir sama dengan relawan atau tim pemenangan Harsono-Halim dalam proses menarik simpatik dan dukungan masyarakat, akan tetapi Gerbong Biru memiliki 2 strategi utama yang menjadi fokus utama dalam kampanye yang dilakukan oleh Gerbong Biru, strategi *pertama* Gerbong Biru membagi wilayah kampanye berdasarkan segmentasi wilayah, hal ini bertujuan tugas utama Gerbong Biru adalah memastikan bahwa konstituen PAN pada Pemilihan Legislatif menjatuhkan pilihannya pada pasangan calon Harsono-Halim sehingga Gerbong Biru fokus pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong gerakan PAN.

Sedangkan teknis kampanye yang dilakukan Gerbong Biru adalah menggunakan kader-kader PAN sebagai pemicu bagi konstituen untuk berkumpul dalam hal ini kader-kader melakukan orasi politik guna mencari perhatian dari konstituen PAN agar berkumpul pada titik kampanye yang disepakati kemudian

²⁶ Wawancara Penulis dengan Janan Sarjito Ketua Gerbong Biru

setelah 30 menit berlalu baru memunculkan pasangan calon untuk melakukan tanya jawab secara interaktif yang berjalan dua arah.

Strategi *kedua* yang digunakan gerbong biru adalah mencari pemilih yang memiliki sifat kedaerahan yang cukup tinggi, sifat kecintaan terhadap daerah akan mempengaruhi psikologis pemilih sehingga yang ditawarkan oleh Gerbong Biru adalah pasangan calon Harsono-Halim merupakan putera daerah asli Bantul sehingga layak dan paham keinginan dan kebutuhan masyarakat Bantul, segmentasi yang dilakukan Gerbong Biru dikarenakan psikologis pemilih di Bantul tidak sama seperti di Kota Jogja dengan mengedepankan aspek rasionalitas sedangkan psikologis pemilih di Bantul masih banyak yang mengedepankan aspek kedaerahan dalam menentukan pilihan.

Menjelang Pemilu ketua Gerbong Biru di panggil untuk menghadap ke Dewan Pimpinan Daerah PAN Bantul dikarenakan isu yang berkembang bahwa Janan Sarjito memobilisasi kader-kader PAN melalui struktural, akan tetapi hal cepat diselesaikan setelah Janan Sarjito memberikan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Daerah PAN Bantul bahwa Gerbong biru tidak mengatasnamakan struktural partai PAN dalam memobilisasi kader-kader dan Gerbong Biru tidak menggunakan atribut kepertaian dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan pemenangan pasangan calon Harsono-Halim, kemudian hal ini dibenarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bahwa tidak ada sanksi Berat yang diberikan kepada kader-kader PAN.

C. Analisis Hasil Pemilukada

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kalahnya Petahana

Demokrasi merupakan sistem yang memberikan derajat ketidakpastian, demokrasi tidak menjamin kelompok yang berkuasa akan kembali berkuasa tanpa adanya perjuangan, hal ini terbukti pada Pemilukada Bantul 2015 kekuasaan yang di miliki Drs. H Idham Samawi selama 15 tahun tidak menjamin bahwa petanaha dalam hal ini istri dari Drs. H Idham Samawi akan melanjutkan periode kepemimpinanya pasca dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul petahana kalah dari lawannya yakni Harsono-Halim dengan selisih suara 27.735 suara, keputusan rakyat Bantul untuk tidak memilih petahana menandakan rezim kepemimpinan keluarga Drs. H Idham Samawi selama 15 tahun di Bantul sudah berakhir pada tahun 2015.

Pada pembahasan sub bagian analisa hasil Pemilukada penulis akan berorientasi kepada faktor-faktor yang menyebabkan petahana tidak kembali menang walaupun memiliki sumber daya politik yang begitu melimpah, sumber daya politik tersebut berupa kekuatan finansial, jumlah partai pengusung, pengalaman memimpin di pemerintahan, di usung oleh partai pemenang pada pemilihan legislatif 2014, ditambah dengan faktor eksternal kompetitor petahana elektabilitasnya di masyarakat sangat rendah dikarenakan komepetitor petahana tidak berkarir di Bantul, keadaan semakin memburuk dengan terjadinya perpecahan di koalisi partai pengusung kompetitor petahana sehingga pendaftaran kompetitor petahana pada *last minute* dari batas yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul.

Berdasarkan pemaparan pada halaman sebelumnya penulis berhasil menghimpun data terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab petahana kalah, faktor-faktor terbagi menjadi kedalam 2 bagian yakni faktor eksternal dan faktor internal, yang dimaksud faktor eksternal adalah berasal dari dalam internal partai pengusung petahana dan faktor eksternal berasal dari luar kewenangan petahana. Faktor internal yang melatarbelakangi petahana tidak terpilih:

1. Terjadi perpecahan di internal partai pengusung petahana yang sekaligus merupakan partai pemenang Pemilu pada sebelumnya dan partai yang memiliki jumlah suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif 2014 yakni PDIP, didalam internal PDIP sudah bergejolak sejak proses penjurian bakal calon yang di tengarai dengan perbedaan pandangan kader-kader PDIP di Bantul yang akhirnya memunculkan dua kubu, puncak perpecahan ditandai dengan dibentuknya Relawan Jas Merah yang mendukung Pasangan Calon bukan petahana.

2. Tim sukses petahana yang melakukan kesalahan fatal karena terlalu yakin menang sehingga memunculkan sikap arogan dan tidak berjuang dengan semestinya dalam memenangkan petahana, tim sukses petahana melupakan salah satu teori dasar dalam demokrasi bahwa demokrasi menawarkan derajat ketidakpastian, sikap tim sukses yang arogan ditunjukkan dengan tidak di mempersiapkan segala bentuk akomodasi sebagai sarana penunjang merebut aspirasi rakyat seperti kaos, kalender, topi dan sebagainya salah satu contoh sikap arogansi yang ditunjukkan tim sukses petahana adalah ketika ada masyarakat Bantul yang mendatangi posko petahana

untuk meminta baju akan tetapi hasil yang didapatkan bukan baju justru sebuah jawaban yang menunjukkan kesombongan bahwa tim sukses petahana tidak menyiapkan baju kampanye dan sebagainya karena tanpa membuat baju dan atribut kampanye lainnya petahana sudah pasti menang. Hal ini yang kemudian menjadi meluas melalui pembicaraan dari mulut ke mulut oleh salah satu warga yang merasakan bentuk arogansi tim sukses petahana. Hal ini penulis dapat dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang berbunyi :²⁷

“Kita hanya memanfaatkan lawan saja, kearogansian mereka yang menjadi keuntungan bagi kami, seperti ada petani ada yang meminta kaos kemereka tapi tidak dikasih, justru mereka jawab kita tidak buat kaos dengan tidak membuat kaos kita pasti menang, akhirnya kita kader-kader PDIP diluar bu idham tau dari cerita mulut ke mulut di kalangan masyarakat dan kita rangkul mereka ”

Sikap arogansi dan memandang rendah pasangan calon Harsono-Halim yang ditunjukkan oleh tim sukses petahana beserta Drs. H Idham Samawi bukan tanpa alasan, ada beberapa hal yang menjadi alasan sikap arogansi tersebut muncul, *kesatu* dikarenakan Suharsono dapat menjadi kompetitor petahana karena atas keterlibatan Drs. H Idham Samawi setelah melakukan proses seleksi kepada Suharsono saat Suharsono mendaftar melalui PDIP sehingga berdasarkan analisis Drs. H Idham Samawi tidak mungkin menang Suharsono jika bertarung dengan petahana, *kedua* pasangan Suharsono sebagai calon Wakil Bupati dari PKB akan tetapi kemunculan PKB dalam mengusung calon Wakil Bupati merupakan kesepakatan dengan Drs. H Idham Samawi untuk memunculkan rival bagi petahana sehingga dipastikan suara

²⁷ Wawancara penulis dengan Sutanto Nugroho Pendiri Jas Merah

PKB tidak akan menuju Abdul Halim Muslih, alasan *ketiga* pada saat periode kampanye Drs. H Idham Samawi mengutus sejumlah orang yang memposisikan sebagai relawan untuk mendatangi Suharsono untuk meminta dana akomodasi dalam rangka pemenangan Harsono-Halim akan tetapi pada setiap kesempatan Suharsono selalu mendapatkan penolakan dan pernyataan ketidakmampuan oleh Suharsono.

3. Data yang dilaporkan tidak Valid, kepercayaan yang begitu tinggi sehingga banyak tim sukses koordinator di tingkat kecamatan yang melaporkan perolehan suara ke Dewan Pimpinan Cabang bahwa perolehan suara petahana diatas 50 persen disetiap kecamatan sehingga di pastikan menang. Laporan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan khususnya kepada Drs. H Idham Samawi, akan tetapi laporan yang disampaikan koordinator di tingkat kecamatan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di tataran bawah laporan tersebut hanya mengedepankan aspek untuk menciptakan euphoria semu bahwa kemenangan petahana sudah ada didepan mata, faktanya berdasarkan hasil penghitungan yang resmi diliris oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul petahana hanya unggul di 4 kecamatan yakni Kasihan, Sedayu, Piyungan, Pundong sedangkan di 14 kecamatan lain petahana kalah total. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang berbunyi ²⁸ :

²⁸ Wawancara penulis dengan Heru Jaka Widada Ketua Jas Merah

“Laporan terakhir di DPC saya dapat info bahwa di setiap kecamatan bu idham diatas 50 persen semua dan dipastikan menang tapi kenyataanya itu hanya laporan kosong kok tidak berdasar real kenyataan dibawah, laporan yang mereka sampaikan hanya bersifat asal bapak senang”

4. Ketidakmampuan tim sukses petahana memberikan tawaran yang dapat merebut hati masyarakat, strategi yang digunakan tentu sebagai petahana menyampaikan keberhasilan selama memimpin dua hal yang menjadi unggulan dan dianggap sebagai sebuah keberhasilan adalah keberhasilan petahana dalam mengelola APBD Bantul dengan pencapaian “Wajar Tanpa Pengecualian” atau WTP dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, pencapaian ini yang tidak dapat dilakukan oleh Drs. H Idham Samawi selama 2 periode memimpin Bantul keberhasilan yang kedua adalah petahana tetap konsisten menolak adanya MALL dan mengatur dan membatasi tumbuh kembangnya toko modern berjejaring.

Marketing politik yang disampaikan oleh tim sukses petahana mengenai keberhasilan petahana tertutupi oleh kemampuan marketing dari pasangan calon Harsono-Halim dengan mengedepankan isu korupsi, isu dinasti politik, dan isu putra daerah, proses marketing politik anti MALL dan keberhasilan WTP tidak mampu ditangkap masyarakat dengan mudah karena pengetahuan masyarakat Bantul khususnya di daerah pedesaan mengenai WTP sangat minim, sedangkan isu korupsi dan isu putera daerah sangat mudah diterima masyarakat hal ini dengan mudah dapat dijelaskan bahwa keluarga petahana sudah tidak lagi anti korupsi dengan bukti korupsi yang dilakukan Drs. H Idham Samawi terkait dana hibah Persiba Bantul dan

masyarakat Bantul mengetahui bahwa baik Drs. H Idham Samawi atau Petahana bukan merupakan putra/putri daerah asli Bantul.

5. Pimpinan tertinggi PDIP Bantul yakni Ariyunadi tidak memiliki pemahaman yang baik terkait kondisi nyata di sosial masyarakat dan tidak memahami strategi-strategi dalam meraih suara masyarakat sehingga tidak mengetahui kekuatan lawan dan kekuatan sendiri hal ini dikarenakan Ariyunadi jarang terjun ke bawah guna meraih aspirasi masyarakat dan sehingga keahlian Ariyunadi berada di tataran administratif. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang merupakan pendiri Jas Merah²⁹ :

“Kelemahan ketua DPC adalah hanya dibalik meja saja, dan tidak membuat strategi pemenangan sehingga yang membuat kan saya dan kawan-kawan jadi apa yang mereka mau lakukan sudah kita potong. Jadi ketua DPC itu tidak paham kekuatan kita dilapangan karena hanya paham data diatas meja , secara administrasi A-Z paham tetapi dia buta soal kekuatan kita dilapangan”

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari Ariyunadi yang tidak mengetahui secara pasti alasan petahana mampu unggul di 4 kecamatan yakni kasihan, pundong, sedayu dan piyungan dengan alasan bahwa lawan politik petahana melalui tim suksesnya melakukan hal-hal yang diluar kemampuan tim sukses petahana. Bahkan Ariyunadi tidak tertarik mengkaji faktor-faktor dan alasan petahana mampu unggul di 4 kecamatan tersebut justru Ariyunadi lebih fokus dalam memberikan dugaan ada kekuatan diluar partai politik yang menggunakan kekuatan

²⁹ Wawancara penulis dengan Sutanto Nugroho pendiri Jas Merah

materialism dalam menjalankan politik transaksional. Berikut hasil wawancara dengan ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul:³⁰

“jadi tidak ada pengkhususan wilayah, strategi kita sama di semua wilayah justru pihak lawan kami yang melakukan strategi diluar kemampuan kami dan saya pastikan kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan, terkait dengan 4 kecamatan kenapa bu sri surya widati bisa menang saya tidak tertarik untuk mencari tahu dan meneliti hal tersebut mungkin kekuatan yang bukan dari partai politik tidak efektif di 4 kecamatan dalam money politics misalnya saya juga tidak tahu persis”

Keraguan terhadap kemampuan dan ketokohan Ariyunadi dipertajam dengan hasil yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul berkaitan dengan hasil suara pada Pemilukada 2015 di Tempat Pemungutan Suara Ariyunadi petahana kalah kemudian hal ini diperparah dengan kalahnya petahana di kecamatan asal Ariyunadi yakni Sewon, Hasil yang dirilis Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul untuk di kecamatan sewon secara keseluruhan petahana kalah dengan selisih 2.401 suara. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang berbunyi ³¹ :

“kami tidak menggunakan politik uang tapi kami berjuang dengan cara yang militant, jika mereka hanya banyak bicara dan hasilnya gagal total, ini terbukti TPS ketua DPC kalah, secara total kecamatan kalah, padahal sebagai pemimpin partai harusnya ditokohkan oleh masyarakat sehingga paling tidak di TPSnya menang ”

³⁰ Wawancara penulis dengan Ariyunadi Ketua DPC PDIP Bantul

³¹ Wawancara penulis dengan Heru Jaka Widada ketua Jas Merah

Sedangkan dari sisi eksternal penyebab kekalahan petahana terbagi dalam 3 poin :

1. Ketidakberhasilan petahana untuk melanjutkan periode kepemimpinan adalah dikarenakan masyarakat Bantul sudah jenuh terhadap rezim kepemimpinan Drs. H Idham Samawi, hal ini merupakan faktor terpenting dan memiliki pengaruh tertinggi dalam meruntuhkan rezim petahana, kejenuhan ini tidak dapat dibaca dengan baik oleh partai pengusung yang justru kembali memunculkan nama petahana sebagai calon bupati dan hasil yang didapatkan adalah PDIP harus merelakan jabatan tertinggi eksekutif di Bantul tidak lagi dimiliki oleh PDIP setelah 15 tahun dikuasi berturut-turut oleh PDIP melalui Drs. H Idham Samawi 2 periode dan Hj. Sri Surya Widati 1 periode setelahnya. Hal ini seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber pendiri Jas Merah yang berbunyi ³² :

“jadi begini kunci kemenangan pak harsono itu karena masyarakat bantul sendiri yang pengen perubahan setelah 15 tahun dipimpin keluarga idham samawi gayung bersambut ada sosok bernama harsono berani muncul menantang bu idham, jadi masyarakat memilih pak har atau tidak mau golput adalah untuk perubahan itu saja”

2. Keberhasilan tim sukses pasangan calon Harsono-Halim dalam merebut hati rakyat Bantul melalui marketing politik yang mudah dipahami masyarakat, seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya proses marketing yang mengedepankan isu korupsi , kolusi dan putra daerah menjadi sangat efektif dalam meruntuhkan rezim Drs. H Idham Samawi selain itu kegigihan dan semangat juang

³² Wawancara penulis dengan Basuki Rahmat pendiri Jas Merah

tim sukses pasangan calon Harsono-Halim perlu diapresiasi, sikap rendah diri dan optimisme menjadi landasan dalam berjuang memenangkan Harsono-Halim dan mengesampingkan sikap arogansi.

3. Pecahnya dukungan internal Nahdatul Ulama di Bantul. Pada realitanya massa PKB mayoritas merupakan anggota, kader dan pengurus Nahdatul Ulama, yang pada kesempatan ini kecewa ketika mengetahui bahwa majunya Abdul Halim Muslih sebagai Wakil Bupati merupakan calon boneka yang dihadirkan untuk memastikan Pemilukada tetap berjalan atau tidak diadakannya Pemilukada dengan kotak kosong, berdasarkan hal tersebut mayoritas kiay-kiay dan ustad-ustad Nahdatul Ulama di Bantul bersatu dan bersepakat akan memenangkan Harsono-Halim karena kemarahannya menempatkan kader Nahdatul Ulama sebagai calon boneka, sehingga tidak mengejutkan ketika suara mayoritas Nahdatul Ulama Bantul menuju ke pasangan calon Harsono- Halim. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang berbunyi ³³ :

“salah satu partai pengusung pak harsono adalah PKB , dan di internal PKB ada perpecahan dikalangan NU, jadi kiay kholik terlalu dekat dengan incumbent sehingga memunculkan kecemburan dikalangan internal NU, sehingga calon yang dihadirkan PKB hanya sebagai boneka berdasarkan hal tersebut kiay-kiay NU secara mayoritas sepakat bahwa tidak bisa kader kita dijadikan calon boneka sehingga berkeinginan harus jadi”

Terdapat fenomena menarik bahwa petahana masih mampu unggul di 4 kecamatan yakni Kasihan, Sedayu, Pundong dan Piyungan dengan selisih yang cukup besar pengeculaian pada kecamatan Pundong yang menempatkan hanya memiliki

³³ Wawancara penulis dengan Rajut Sukasworo ketua Suharsono Center

selisih suara 112 suara. Hal yang menyebabkan keberhasilan petahan unggul di 4 kecamatan tersebut meliputi beberapa faktor, berikut beberapa faktor yang menjadi sebab petahan mampu unggul di 4 kecamatan tersebut. Pada realitanya Kecamatan Kasihan merupakan Kecamatan yang menjadi lumbung suara petahana karena mampu unggul dengan selisih suara 8.157 suara hal ini dapat terjadi dikarenakan 3 poin yang diantaranya adalah *pertama*, kasihan tidak menjadi sasaran perolehan suara dari pasangan calon Harsono-Halim karena kecamatan Kasihan merupakan basis terbesar pemilih fanatik PDIP sehingga pemilih fanatik PDIP ini tidak memperhatikan calon yang diusung akan tetapi memilih siapapun calon yang diusung oleh PDIP.

Poin *kedua* anggota dewan yang berasal dari kasihan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat pada Dapilnya saat Pemilihan legislative lalu sehingga konstituen anggota dewan yang berasal dari kasihan suaranya di arahkan menuju petahana dan hal tersebut dikawal dan terjadi pendampingan yang dilakukan secara masif, poin *ketiga* Kecamatan Kasihan diperlakukan dengan istimewa hal ini merujuk pada kenyataan bahwa Drs.H Idham Samawi turun langsung ke kasihan karena pada evaluasi 3 bulan sebelum Pemilukada laporan yang masuk ke Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul Kecamatan Kasihan merupakan satu-satunya Kecamatan yang menyatakan bahwa petahana kalah karena tim sukses petahana dikasihan tidak melakukan gerakan apapun, mengetahui hal tersebut Drs. H Idham Samawi yang mengetahui kabar buruk tersebut melakukan manuver politik dengan

menggendong dan menggerakkan kader-kader kesehatan yang ada dikasihian sehingga yang lebih banyak bergerak di kasihan bukan tim sukses partai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber yang berbunyi ³⁴ :

“Pak idham turun langsung karena ada laporan dari DPC bahwa satu-satunya kecamatan yang menyatakan kalah hanya kasihan, itu terjadi 3 bulan sebelum pemilihan saat evaluasi. Itu merupakan bentuk laporan timses dan anggota dewan yang berasal dari dapil tersebut sehingga mengetahui kasihan tidak siap pak idham menggerakkan kader-kader kesehatan jadi dikasihian malah tidak lewat partai”

Sedangkan pada Kecamatan Sedayu yang menjadi penyebab unggulnya petahana disebabkan dua hal, *pertama* berita tentang Suharsono sangat minim hal ini terjadi karena sedayu berada di antara perbatasan Bantul dan Kulon Progo sehingga jauh dari pemebritaan, poin *kedua* tidak berbeda jauh dengan Kecamatan Kasihan untuk di Kecamatan Sedayu Harsono-Halim mengalami kalah pendampingan, kalah pendampingan tersebut terjadi dikarenakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari PDIP, Gerindra dan PPP mampu mengarahkan konstituennya untuk mendukung petahana, sehingga jika relawan Suharsono dalam hal ini Jas Merah mengurungkan niat untuk bersaing dari segi biaya melawan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari 3 partai tersebut.

Salah satu pendiri Jas Merah yang berasal dari Kecamatan Sedayu yakni Sutanto Nugroho dalam upayanya memenangkan Harsono-Halim, mencoba mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan hal tersebut berhasil akan tetapi satu hari setelahnya tim sukses petahana yang merupakan utusan anggota

³⁴ Wawancara penulis dengan Sutanto Nugroho pendiri Jas Merah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul dari 3 partai politik diatas melakukan sosialisasi di Kecamatan Sedayu dengan membawa fasilitas lain berupa bantuan sosial dan bantuan sembako, sedangkan Suharsono tidak memiliki fasilitas dan kekuatan finansial untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh tim sukses petahana tersebut sehingga keputusan Jas Merah bersama Suharsono serta tim pemenangan melepaskan daerah tersebut karena tidak mungkin menang jika menandingi dana yang berasal dari APBD.

Pada Kecamatan Pundong dan Kecamatan Piyungan faktor yang penyebab menangnya petahana dikarenakan tidak terjalin komunikasi yang baik antar relawan dan tidak ada komitmen yang teguh dari kader-kader Jas Merah yang ada di dua kecamatan tersebut hal ini dikarenakan kuatnya intervensi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul. Hal ini merujuk kepada petikan wawancara penulis dengan salah satu narasumber pendiri Jas Merah yang berbunyi³⁵ :

“jadi alasan kenapa pak har kalah di pundong dan piyungan karena pada saat itu di internal kami di dua kecamatan tersebut tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada komitmen yang teguh dari PAC pundong dan piyungan, hal ini bisa juga dilatarbelakangi mereka terus di intervensi oleh DPC.”

³⁵ Wawancara penulis dengan Heru Jaka Widada Ketua Jas Merah

2. Penyelenggaraan Pemilukada

Kehidupan demokrasi yang tumbuh dan berkembang di daerah mensyaratkan dan melahirkan kepemimpinan yang kuat dan berporos pada rakyat. Pempimpin di daerah, harus mampu mengejawantahkan kehendak rakyat dalam setiap program dan kebijakannya. Kesejahteraan rakyat, akses keadilan bagi rakyat terhadap sumber daya yang ada di daerah adalah harapan kehidupan demokrasi yang mapan. Hal tersebut dapat diperoleh ketika kepemimpinan di daerah menjadikan amanah rakyat sebagai tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai landasan pijak pengambilan kebijakan serta dalam perumusan regulasi.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan elemen membangun demokrasi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi pintu masuk dalam membangun kepemimpinan yang berlandaskan kepentingan rakyat. Pilihan rakyat terhadap calon pemimpinnya akan menentukan kemajuan dan kesejahteraan rakyat, oleh karenanya rakyat dituntut untuk menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki kapasitas, integritas dan komitmen untuk melayani rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat dan mensejahterakan rakyat.

Dalam rangka menghadirkan pemimpin yang berintegritas, berkompeten dan memiliki komitmen maka diperlukan pemilihan yang berintegritas, untuk mewujudkan hal tersebut hanya dapat tercapai jika Penyelenggara Pemilihan

memiliki kapasitas, integritas, komitmen, imparialitas, independensi dan netralitas. Penyelenggara pemilihan yang tidak memiliki kriteria tersebut sudah dapat dipastikan tidak akan menciptakan pemilihan yang berintegritas. Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ,menjadi Undang-Undang telah memberikan mandat kepada Komisi Pemilihan Umum Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak pada tahun 2015. Kabupaten Bantul adalah salah satu daerah yang harus melaksanakan Pemilukada Serentak periode pertama dikarenakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode lalu sudah berakhir sejak 27 Juli 2014.

Dalam upayanya menciptakan Pemilukada yang berintegritas Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul merumuskan perencanaan strategis dan melakukan perencanaan anggaran. Perencanaan strategis dimulai dari internal Penyelenggara Pemilihan yakni 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah bantul berkomitmen untuk menjaga netralitas, profesionalitas dan integritas. Komitmen untuk menjaga dan menghadirkan Pemilihan yang berintegritas mengharuskan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul untuk menempatkan kepentingan rakyat dan menolak secara tegas tawaran praktek-praktek kedekatan hubungan personal atau hubungan pribadi untuk mendahulukan kepentingan golongannya. Prinsip yang menjadi pedoman 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul kemudian ditularkan ke sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul, secara sederhana nilai-nilai yang

ditanamkan adalah untuk tidak memihak salah satu pasangan calon yang berkompetisi.

Pasca menanamkan komitmen dan integritas di tataran internal Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul selanjutnya tugas dari 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul menyusun perencanaan anggaran, pasca di tetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada saat yang hampir bersamaan hadir Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Perkembangannya ditemukan beberapa kelemahan di Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 berkaitan dengan tidak terjadi sinkronisasi antara struktur anggaran yang ada dengan tahapan pemilihan, salah satu contohnya adalah belum ada uraian kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kampanye oleh Penyelenggara Pemilu, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pada pasal 65 ayat (2) disebutkan beberapa kegiatan kampanye di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang di danai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan fakta tersebut memaksa Menteri Dalam Negeri untuk melakukan revisi Permendagri dengan menetapkan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomo 44 tahun 2014 tentang

pengelolaan dana kegiatan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Kedua Regulasi diatas mengharuskan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul melakukan audiensi dengan Bupati Bantul, Audiensi tersebut terjadi pada tanggal 24 oktober 2014 hal ini dilakukan untuk menyampaikan amanat konstitusi terkait anggaran Pemilukada yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyampaian mekanisme dana hibah yang diperuntukkan untuk Pelaksanaan Pemilukada Bantul 2015. Pasca audiensi dengan Bupati Bantul, Komis Pemilihan Umum Daerah Bantul melakukan koordinasi teknis terkait dengan Rancangan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul. Selain DPPKAD terdapat beberapa SKPD yang terlibat intensif dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pemilihan yakni bagian Hukum serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pembahasan anggaran untuk Pemilukada Bantul memerlukan waktu yang cukup panjang, hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran daerah yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan Pemilukada, keterbatasan anggaran dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bantul mengalami defisit berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul mengalami beberapa proses revisi, rasionalisasi dan efisiensi. Rancangan anggaran yang pertama kali disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul kepada pemerintah

Kabupaten Bantul sesuai dengan amanat Perppu Nomor 1 Tahun 2015 yang diajukan pada bulan November 2014 sebesar Rp19.975.360.859, akan tetapi setelah dilakukan pengkajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah hal tersebut ditolak dan diharuskan melakukan revisi yang disesuaikan dengan struktur anggaran Permendagri Nomor 44 Tahun 2015.

Pada Tanggal 28 April 2015 Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul kembali mengajukan rancangan anggaran Pemilukada 2015 kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 18.678.152.883 melalui surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul nomor 136/KPU-Kab/Btl.013-329.600/IV/2015. Rancangan anggaran yang yang kedua tersebut setelah dilakukan pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tetap diharapkan ada penghematan dan rasionalisasi, untuk menindaklanjuti hal tersebut internal komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul kembali melakukan revisi, salah satu contoh anggaran yang mengalami revisi adalah pengadaan bahan kampanye yang semula poster berbasis Kepala Keluarga (KK) kemudian dirasionalisasi menjadi berbasis Rukun Tetangga (RT).

Selanjutnya pada awal Mei 2015 Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul menyampaikan rancangan anggaran untuk ketiga kalinya untuk keperluan Pemilukada Bantul 2015 sebesar Rp. 18.628.446.500 yang pada akhirnya disepakati dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Komisi Pemilihan Umum Bantul dengan Nomor : 900/02195 dan Nomor :

165/KPU.Kab/Btl.013.0329.600/V/2015 tentang pemberian dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015, proses penandatanganan NPHD dilaksanakan pada hari senin 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Bantul Hj. Sri Surya Widati dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul M. Johan Komara, S.IP. Pada NPHD yang telah ditandatangani disebutkan pencairan anggaran akan dilakukan secara bertahap. Berikut Tabel rancangan anggaran Pemilukada 2015 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul Tahun 2015 ;

Tabel 3.6

Rancangan Anggaran Pemilukada Bantul 2015

No.	Rincian Anggaran	Tanggal Pengajuan	Keterangan
1.	Putaran 1 : Rp. 12.619.483.025 Putaran 2 : Rp. 7.355.877.834	November 2014	Revisi dan Rasionalisasi
2.	Rp. 18.673.152.883	April 2015	Revisi dan Rasionalisasi
3.	Termin 1 : Rp. 4.927.284.300 Termin 2 : Rp. 4.515.931.200 Termin 3 : Rp. 9.185.231.000	Mei 2015	Disetujui

Sumber : *Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul 2015*

Pasca Penetapan Anggaran yang akan digunakan dalam Pemilukada Bantul 2015 Komisi Pemilihan Umum segera membentuk Badan *Ad Hoc* yang akan menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilihan, hal ini disebabkan Badan *Ad Hoc* yang akan bersentuhan langsung dengan pemilih dan akan menjadi pelayan pertama bagi pemilih. *Badan Ad Hoc* terdiri atas 3 bagian yakni Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) di tingkat Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mandat yang diberikan kepada Badan *Ad Hoc* tidak sekedar teknis penyelenggaraan Pemilihan saja, tetapi mandat yang bersifat substansi seperti fasilitasi penyelenggaraan hak pilih tanpa diskriminasi, pelayanan terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, dan tugas-tugas besar lainnya. Mengingat fundamentalnya peran Badan *Ad Hoc* mengharuskan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul untuk memastikan sumber daya manusia yang tergabung dalam Badan *Ad Hoc* memiliki sifat dan pedoman yang sama dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul yakni kapasitas, integritas, komitmen, imparsialitas, independensi dan netralitas sebagai salah satu syarat dalam menyelenggarakan Pemilihan yang berintegritas.

Proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara tidak berjalan begitu mulus karena mengalami beberapa kali perpanjangan masa pendaftaran hal ini disebabkan karena sampai pada hari yang ditentukan baik Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara belum memenuhi jumlah yang di inginkan. Pasca melakukan masa perpanjangan pendaftaran akhirnya berhasil mencapai target dan kuota yang di inginkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul dengan jumlah 324 orang untuk calon anggota Panitia Pemungutan Suara dan 211 orang untuk calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

Terdapat perbedaan mekanisme seleksi dari kedua Badan *Ad Hoc* tersebut, proses tahapan seleksi untuk Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi 3 aspek yakni seleksi administrasi, seleksi tertulis dan seleksi wawancara sedangkan untuk Panitia Pemungutan Suara hanya meliputi 2 aspek yakni seleksi administrasi dan seleksi wawancara, perbedaan selanjutnya yakni pada tes administrasi jika Panitia Pemilihan Kecamatan mendaftarkan sendiri ke sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul sedangkan untuk Panitia Pemungutan Suara proses seleksi melalui usulan dari Pemerintah Desa (Lurah dan BPD), calon anggota Panitia Pemungutan Suara mengajukan diri dan melengkapi berkas persyaratan kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya diseleksi oleh Pemerintah Desa dan diusulkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul.

Pasca melalui proses seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara terjaring sebanyak 85 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan rincian setiap 1 Kecamatan akan ditempatkan 5 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sedangkan untuk Panitia Pemungutan Suara terjaring sebanyak 225 orang yang masing-masing akan ditempatkan 3 orang di setiap Desa dengan jumlah desa yang ada di Bantul sebanyak 75. Setelah ditetapkan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia pemilihan Suara Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul melukan pengambilan sumpah jabatan sekaligus melantik kedua *Badan Ad Hoc* tersebut, pengambilan sumpah jabatan dilakukan pada waktu yang berbeda untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan pada tanggal 29 Mei

2015 dan Panitia Pemungutan Suara sehari setelahnya yakni pada tanggal 30 Mei 2015.

Langkah awal yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul pasca pengambilan sumpah jabatan adalah melakukan pembekalan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara terlintik yang dimaksudkan untuk menanamkan spirit penyelenggaraan Pemilu dalam menjalankan mandat yang mulia sebagai penyelenggara Pemilu. Berikut Tabel materi Pengarahan dan Orientasi bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara ;

Tabel 3.7

Materi Pengarahan dan Orientasi PPK/PPS Kabupaten Bantul 2015

No	Materi	Narasumber	
		PPK	PPS
1.	“Peran Pemda Bantul untuk sukses Pilbup 2015”	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kesbangpol Kabupaten Bantul
2.	“Spirit Pilbup 2015 dan Demokrasi”	Ari Sujito, S.Sos, M.Si (UGM)	Bambang Eka Cahya Widodo S.IP, M.Si & Tunjung Sulaksono S.IP, M.Si (UMY)
3.	“Integritas, Profesional, Neralitas, <i>Team Work</i> ”	Ketua KPU DIY	Drs. Syachruddin, S.E , Arif Widayanto , S.Fil, dan Titik Istiyatun Khasanah, S.IP (KPU Bantul)
4.	“Mekanisme Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Pilbup 2015”	Ketua Bawaslu DIY	Drs. Supardi, Nuril Hanafi, S.T, dan Harlina, S.H (Panwaslu Bantul)

Sumber : *Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul 2015*

Dengan terlantiknya Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara tahapannya selanjutnya adalah pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS). Panitia Pemutakhiran Data Pemilih memiliki tugas membantu Panitia Pemungutan Suara dalam pemutakhiran data pemilih dan yang bertindak sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah pamong desa (dukuh). Sedangkan untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada hari pencoblosan. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dengan keputusan Panitia Pemungutan suara atas nama ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul yang berjumlah 7 orang terdiri atas 1 orang ketua dan 6 orang anggota, dengan usaha yang tak kenal letih akhirnya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terlantik dan berjumlah 12.376 orang tersebar di 1.768 Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan telah terbentuknya seluruh Penyelenggara Pemilu dari tataran Kabupaten sampai Desa tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul dilakukan pendaftaran Pasangan Calon, proses pendafatarn Pasangan Calon sesuai dengan pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah pertama, menerima dokumen persyaratan pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik atau

gabungan Partai Politik. Kedua, meneliti pemenuhan persyaratan pasangan calon yang diatur Pasal 36 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Ketiga, meneliti keabsahan persyaratan dokumen pencalonan.

Pendaftaran Pasangan Calon diawali dengan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon yang termuat dalam surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul Nomor : 286/KPU-kab/Btl-329.600/VII/2015 tertanggal 15 Juli 2015 tentang pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015. Pengumuman ini dilaksanakan melalui beberapa media yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul, pertama melalui website yang dapat diakses dengan menuju lama www.kpu-d-bantulkab.go.id, kedua melalui email : kpu@bantulkab.go.id, ketiga melalui papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul serta yang terakhir, melalui media massa dan media cetak. Sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran yakni tanggal 28 juli 2015 pukul 16.00 WIB.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul menerima 2 pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik yakni pasangan Hj. Sri Surya Widati dengan Drs. Misbakhul Munir, M.Si yang diusung oleh PDIP dan Partai NasDem dengan menyerahkan berkas pendaftaran pada tanggal 26 juli 2015. Kedua pasangan Drs. H. Suharsono dengan H. Abdul Halim Muslih yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKB dengan menyerahkan berkas pendaftaran pada tanggal 28 juli 2015.

Pada tanggal 29 juli 2015 kedua Pasangan Calon yang mendaftar diharuskan mengikuti seleksi tes kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul dan Rumah Sakit yang dipilih adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul, kemudian hasil tes kesehatan kedua Pasangan Calon diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul pada 1 Agustus 2015 dan menyatakan kedua Pasangan Calon memenuhi syarat kesehatan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul. Berdasarkan hasil kesehatan yang menunjukkan kelayakan kedua Pasangan Calon Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul melaksanakan penelitian persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada tanggal 3 Agustus 2015. Berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan, kedua Pasangan Calon harus melakukan perbaikan berkas calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.HP.KWK.

Berdasarkan hasil penelitian Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul terkait dengan perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sehingga pada tanggal 24 agustus 2015 Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rapat pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantu Tahun 2015, hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam berita acara Nomor 52/BA/VIII/2015 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015.

Pasca penetapan pasangan calon pada tanggal 25 Agustus 2015 Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul melaksanakan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut dalam acara pengundian nomor urut dihadiri oleh Pasangan Calon, Gabungan Partai Pengusung Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta beberapa tamu undangan. Tata cara pengundian nomor urut dilaksanakan sesuai dengan tata tertib yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul. Hasil pengundian nomor urut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul yang tertuang dalam berita acara Nomor : 53/BA/VIII/2015 Tentang Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015. Adapun nama, nomor urut dan partai pengusung Pasangan Calon sebagai berikut ;

Tabel 3.8

Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Pada Pemilu 2015

Nomor urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul	Gabungan Partai Pengusung
1.	Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih	Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat

Sumber : *Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul 2015*

Salah satu indikator Keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul dalam menyelenggarakan Pemilu yang berintegritas salah satunya ditentukan dengan partisipasi pemilih, Pada Pemilu 2015 Komisi Pemilihan Umum Daerah

Bantul melakukan beberapa strategi dalam melakukan sosialisasi terkait Pemilu guna meningkatkan partisipasi pemilih. Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul dengan cara melalui dua sektor yakni sektor darat dan sektor udara.

Pada implementasinya sosialisasi sektor darat dibagi menjadi 2 yakni berdasarkan segmentasi dan kewilayahan, untuk berbasis kewilayahan terbagi atas Kabupaten, Kecamatan, dan Desa hal tersebut dilakukan dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat di setiap wilayah berdasarkan jenis klasifikasinya sedangkan yang berbasis segmentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul melakukan pembagian terkait calon pemilih yang akan dijadikan sasaran sebagai objek dalam sosialisasi, sasaran yang dijadikan objek adalah komunitas perempuan, komunitas lansia, Komunitas Pemilih Pemula, komunitas kesenian, dan komunitas disabilitas.

Kemudian sektor yang kedua adalah sektor udara, media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi di sektor udara adalah radio, Televisi, Media Sosial berupa *Facebook, Twitter, Website Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul, Whatsapp, SMS-Broadcast* serta yang tidak kalah penting adalah melalui alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk, dan poster. Sedangkan pada Pemilu Bantul 2015 Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul tidak merekrut relawan demokrasi hal ini disebabkan dalam anggaran kegiatan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak menganggarkan anggaran bagi keterlibatan relawan demokrasi dalam

Pemilukada serentak Tahun 2015. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Johan Kumara yang berbunyi ;

“Terkait dengan relawan demokrasi, ini pada pemilu 2014 ada anggaran kegiatan dari KPU RI namun pada pilkada 2015 tidak anggaran kegiatan untuk relawan demokrasi sehingga kita tidak merekrut relawan demokrasi”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diturunkan menjadi PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kampanye pemilihan adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan atau meyakinkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Sedangkan tujuan kampanye adalah sebagai wujud pendidikan politik kepada masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan harapan terjadinya peningkatan partisipasi pemilih. Regulasi Pemilukada 2015 mengharuskan Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan fasilitasi kampanye berupa pembuatan dan pemaangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan jumlah tertentu, akan tetapi dengan regulasi yang demikian memunculkan kekhawatiran menurunnya angka partisipasi pemilih karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum yang dibebankan dalam pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan. Berikut daftar Alat Peraga Kampanye yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul :

Tabel 3.9

**Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh KPUD Bantul pada
Pemilukada 2015**

No	Jenis APK	Jumlah	Keterangan
1.	Baliho, ukuran : 2m x 3m	5 buah tiap paslon	dipasang di wilayah Kabupaten
2.	Umbul-Umbul, ukuran : 1,15 x 5 m	10 buah tiap paslon	dipasang di wilayah kecamatan
3.	Spanduk, ukuran : 60 cm x 5 m	2 buah tiap paslon	Dipasang di wilayah Desa/Kelurahan

Sumber : *Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul 2015*

Dalam pelaksanaan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye, Komisi Pemilihan Umum memberikan berbagai metode kampanye yang dapat dilakukan pasangan calon yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Metode tersebut diantaranya *satu* pertemuan terbatas, metode jenis ini merupakan pertemuan dengan jumlah peserta terbatas di dalam ruangan atau di gedung tertutup yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pasangan calon/tim kampanye. Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas ruangan, maksimum 2.000 orang untuk tingkat Provinsi, dan 1.000 orang tingkat Kabupaten/Kota, undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat, kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.

Metode *kedua* adalah Pertemuan tatap muka dan dialog, pertemuan ini dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung disertai dengan dialog interaktif pertemuan ini dapat dilakukan di dalam ruangan atau diluar ruangan. Jika dilakukan di dalam ruangan tidak diperkenankan menghadirkan peserta melebihi

kapasitas sedangkan jika diluar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.

Metode yang *ketiga* rapat umum, sesuai dengan regulasi yang ada Pasangan calon dan/ atau Tim Kampanye dalam kegiatan rapat umum dapat melaksanakan kegiatan seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), dan kegiatan sosial (bazaar, donor darah, perlombaan) serta melalui media sosial, rapat umum pada massa kampanye dilakukan mulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat 18.00 waktu setempat. Pada pemilukada Bantul 2015 Pasangan Calon nomor urut 1 menyelenggarakan rapat umum yang dilaksanakan di lapangan Dwi Sapta Ringharjo, Bantul sedangkan Pasangan Calon nomor urut 2 menyelenggarakan rapat umum di lapangan Trirenggo, Bantul.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan pasangan calon, pelanggaran tersebut berupa terdapat beberapa alat peraga kampanye yang di pasang sendiri oleh tim sukses Pasangan Calon hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam regulasi, dikarenakan fasilitasi dan pemasangan alat peraga kampanye sudah menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan umum. Kemudian pasca Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul mendapati dan menemukan pelanggaran tersebut Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul menerbitkan surat sanksi yang

sebelumnya sudah dikoordinasikan kepada Panitia Pengawas Pemilu pada saat Pemilukada Bantul 2015 sanksi tersebut berupa surat teguran yang berisi perintah kepada tim sukses Pasangan Calon untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul. Hal ini berdasar salah satu petikan wawancara penulis dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul³⁶ :

“kemarin hanya terjadi pelanggaran administratif saja, yakni ada alat peraga kampanye yang dipasang oleh tim sukses pasangan calon padahal sesuai regulasi pemasangan alat peraga kampanye sudah di fasilitasi oleh KPU, sehingga sanksi yang kita berikan berupa surat teguran kepada pasangan calon untuk menurunkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai tersebut”

Tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penentuan ini Komisi Pemilihan Umum melalui beberapa tahapan, tahapan pertama adalah memverifikasi dan memvalidasi data Pengolahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 24 juni 2015 melalui aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih). Kemudian setelah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu di peroleh oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul data tersebut divalidasi dan diverifikasi untuk kemudian menjadi bahan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) berdasarkan fakta yang ada dimasyarakat , Pencocokan dan Penelitian Data ini menjadi tanggung jawab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk pasca Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul memperoleh Data Penduduk Potensial

³⁶ Wawancara penulis dengan Muhammad Johan Kumara ketua KPUD DIY

Pemilih Pemilu. Mekanisme yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melakukan pencocokan data adalah dengan cara turun langsung mendatangi rumah demi rumah penduduk demi menselaraskan data yang ada dengan kondisi nyata di masyarakat.

Hasil yang diperoleh oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diunggah ke portal Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih yang nantinya akan menjadi acuan dalam dalam perumusan Daftar Pemilih Sementara (DPS), setelah Daftar Pemilihan Sementara diumumkan tanggapan dari masyarakat Bantul minim oleh sebab itu untuk memastikan data Daftar Pemilih Sementara merupakan data yang Valid Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul memberikan mandat kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk melakukan pencermatan data pemilih di wilayah kerja masing-masing, mekanisme yang dipakai untuk pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara memasukkan pemilih baru dan mencoret data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Pada tanggal 2 oktober 2015 Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilukada Bantul dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti Tim Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilu, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus Kependudukan, Perwakilan Ormas dan PPK. Berikut data lengkap Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilukada Bantul;

Tabel 3.10**Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Bantul 2015**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Bambanglipuro	3	85	15.358	16.445	31.803
2.	Banguntapan	8	191	36.890	38.997	75.887
3.	Bantul	5	115	22.441	23.904	46.345
4.	Dlingo	6	84	14.707	15.102	29.809
5.	Imogiri	8	128	23.219	24.224	47.443
6.	Jetis	4	119	20.923	22.042	42.965
7.	Kasihani	4	165	36.138	37.246	73.384
8.	Kretek	5	67	11.253	12.715	23.968
9.	Pajangan	3	70	12.670	13.030	25.700
10.	Pandak	4	100	19.540	20.228	39.768
11.	Piyungan	3	93	17.895	18.631	36.526
12.	Pleret	5	80	16.483	16.951	33.343
13.	Pundong	3	74	13.530	14.643	28.173
14.	Sanden	4	68	12.536	13.359	25.895
15.	Sedayu	4	90	16.679	17.378	34.057
16.	Sewon	4	175	35.660	36.565	72.225
17.	Srandakan	2	64	11.794	12.269	24.063
	Total	75	1.768	337.716	353.729	691.445

Sumber : *Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul 2015*

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Bantul dalam pemilihan bupati Bantul dan wakil Bupati Bantul dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul Nomor : 94/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tertanggal 16 desember tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 dengan menempatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 mendapatkan perolehan suara tertinggi, kemudian proses selanjutnya adalah penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dapat dilaksanakan setelah berakhirnya masa pengajuan

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PPHP) ke Mahkamah Konstitusi terlewat hal ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota atau Wakil Walikota Terpilih dilakukan paling lama 3 hari setelah batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PPHP) ke Mahkamah Konstitusi berakhir yakni tiga kali dua puluh empat jam setelah penetapan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten

Sampai pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum diatas tidak terjadi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan , sehingga pada tanggal 21 Desember 2015 Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul melakukan rapat pleno terbuka berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon terpilih dengan menetapkan Pasangan Calon nomor urut 1 Dr. H Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015.

Kekalahan petahana merupakan sebuah kejadian yang tidak terduga, hal ini membuka lembaran baru bagi Bantul dalam melakukan perubahan setelah 15 tahun dipimpin oleh keluarga Drs. H Idham Samawi, akan tetapi terdapat suatu hal yang luar biasa baik dari sisi Penyelenggara Pemilu hal ini berkaitan dengan tidak adanya gugatan atau Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PPHP) ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan calon yang tidak mendapatkan amanah dari rakyat walaupun fakta menunjukkan kalahnya petahana pada margin 5 % hal ini yang

mendorong penulis mencoba melakukan penelitian dan analisis terkait alasan tidak munculnya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan.

Terdapat 3 faktor yang melatar belakangi tidak adanya gugatan yang dilayangkan oleh petahan *pertama*, sumber daya yang menyelenggarakan Pemilukada dari tataran Kabupaten sampai ke tataran desa berhasil memegang teguh prinsip kapasitas, integritas, komitmen, imparsialitas, independensi dan netralitas. Dari sisi teknis penyelenggaraan Komisi pemilihan melakukan sebuah terobosan dengan melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) sebanyak dua kali kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan melibatkan seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hal ini berdasarkan hasil evaluasi pada Penyelenggaraan Pemilihan sebelumnya yakni pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Pada tahun 2014 terdapat banyak kesalahan yang dilakukan, kesalahan tersebut meliputi teknik penghitungan, teknik penulisan, dan lain-lain.

Tema yang diberikan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terbagi atas 2 hal , pertama Pemungutan dan Penghitungan Suara , kemudian yang kedua kode etik penyelenggara dan hal tersebut dan untuk menyokong keberhasilan dari proses Bimbingan Teknis yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul memberikan buku panduan teknis kepada semua penyelenggara dari tingkat Kecamatan sampai ke tingkat pedukuhan dengan harapan agar keseluruhan penyelenggara pemilihan memiliki pemahaman akan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing. Sedangkan jika dilihat dari segi kuantitas Bimbingan Teknis yang diterima oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara tidak sama dengan apa yang diterima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Hal ini tentu berdasarkan tingkat kesulitan yang berbeda , beberapa tema yang didapatkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara adalah sebagai berikut Bimbingan Teknis penyelenggara internal, teknis pencalonan, teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Faktor *kedua* adalah, terdapat suatu terobosan yang luar biasa dari Komisi Pemilihan Umum Pusat yang diadopsi sampai kepada Komisi Pemilihan Umum di tingkat Daerah yakni adalah Scan C1, C1 adalah hasil penghitungan di tingkat TPS pada hari yang sama hasil penghitungan tersebut harus dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul untuk kemudian pada hari yang sama diunggah ke *website* Komisi Pemilihan Umum Pusat hal ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan atas informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui siapa Pasangan calon yang unggul hal ini dilakukan karena akan menggunakan waktu beberapa hari jika menunggu penghitungan manual selesai dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, dan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul, dengan Tim Independen yang melakukan hitung cepat dalam kesempatan Pemilukada Bantul 2015 diserahkan kepada *Index Indonesia* dan hasil scan C1 selisih margin erornya dibawah satu persen hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang tidak

puas untuk berfikir ulang jika ingin melayangkan gugatan karena hasil Pemilukada Bantul 2015 merupakan pilihan rakyat Bantul.

Faktor *ketiga* adalah tidak adanya penggelembungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara, Tingkat Kecamatan sampai di tingkat Kabupaten. Proses penggelembungan suara tidak selalu di dasari dari unsur kesengajaan akan tetapi bisa juga dilatarbelakangi dari kesalahan teknis, untuk mencegah hal tersebut penyelenggara pemilihan melakukan 2 strategi untuk mencegah hal tersebut terjadi *pertama*, jika terdapat kesalahan pada proses rekapitulasi dapat diperbaiki di tingkat selanjutnya, dengan catatan proses pembenaran tersebut disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu dan saksi dari masing-masing Pasangan Calon, jika pada proses pembenaran terjadi perbedaan data maka harus dilakukan validasi data yang dimiliki oleh penyelenggara pemilihan, Panitia Pengawas Pemilu dan saksi masing-masing Pasangan Calon untuk menemukan titik tengahnya keputusan diambil pada suara mayoritas yang memiliki kesaamaan data.

Akan tetapi jika pada kesempatan tersebut suara masih sama maka penyelenggara pemilihan dapat membuka Plano 1 yang berasal dari penghitungan ditingkat kecamatan, sedangkan jika perbedaan di tingkat Tempat Pemungutan Suara salah satu terobosan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul penghitungan data menggunakan teknologi *microsoft excel* dengan sistem yang di kunci oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul sehingga jika melakukan perubahan angka maka

secara otomatis akan terlihat dengan jelas karena akan memunculkan ketidaksesuaian pada aplikasi *microsoft excel* tersebut.

Strategi *kedua* adalah menggunakan analogi linear dalam penghitungan suara, hal ini di implementasikan kedalam sebuah rumus yakni jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan surat suara yang digunakan dan harus sama dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah, dengan metodologi pemikiran tersebut akan memunculkan hasil yang linear antara ketiganya sehingga tidak mengecilkan peluang kesalahan dan penggelembungan suara.

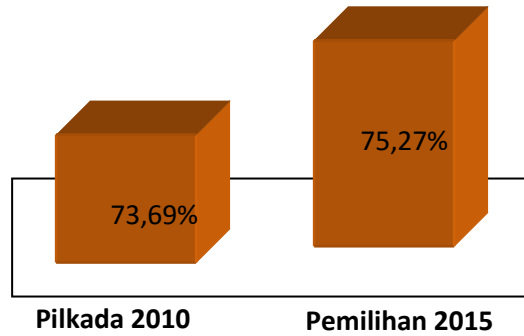
Pencapaian Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul layak mendapatkan apresiasi karena memiliki berhasil melaksanakan Pemilukada dengan berhasil, indikator keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan 3 hal, *pertama* pasca penetapan Pasangan Calon terpilih yakni Pasangan Calon Drs. H Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih kondusifitas wilayah Kabupaten Bantul tetap terjaga dan tidak terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan dari pihak-pihak yang tidak puas atas pilihan masyarakat Bantul.

Kedua, Tidak terjadinya Pemungutan Suara Ulang pada Pemilukada Bantul Tahun 2015 hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggara pemilihan sudah melakukan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, syarat-syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 pasal 59 yang berbunyi Pemungutan Suara

Ulang dapat terjadi apabila adanya gangguan keamanan secara masif, proses pemilihan tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara meminta pemilih untuk menuliskan namanya dan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merusak lebih dari satu surat suara serta pemilih memilih lebih dari satu kali pada Tempat Pemungutan Suara yang sama.

Terakhir, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul berhasil menaikkan angka partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pemilu pada Tahun 2010 yang hanya sebesar 73,69 % sedangkan pada Pemilu pada Tahun 2015 di Kabupaten Bantul persentase partisipasi pemilih mencapai 75,27 % artinya terjadi kenaikan sebesar 1,58 % selain itu pada saat yang sama Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten tertinggi jika dibandingkan dengan 3 Kabupaten yang melakukan Pemilu serentak pada 9 Desember yakni Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul, untuk Kabupaten Sleman persentase partisipasi pemilih hanya sebesar 72,23% sedangkan untuk Kabupaten Gunung Kidul hanya memiliki persentase partisipasi pemilih 70,09 %. Kedua pencapaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul sejak penyusunan anggaran, perekrutan badan *Ad Hoc*, Persiapan Pemilu yang marathon dan berhasil menjaga netralitas, independensi, integritas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan. Berikut diagram persentase pemilih di Kabupaten Bantul dan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilu serentak Tahun 2015 ;

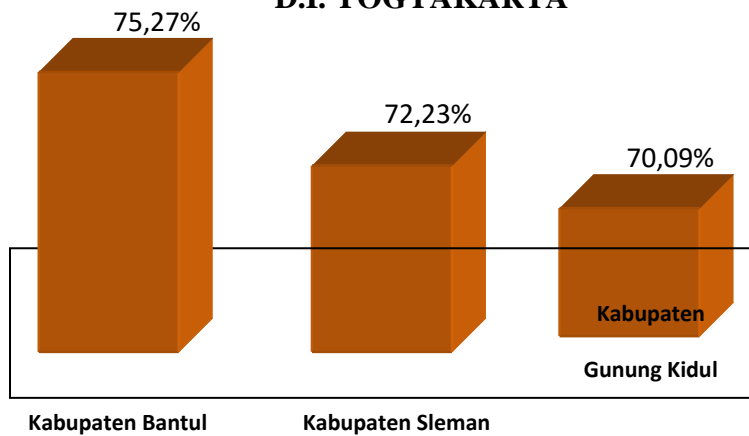
PROSENTASE PERBANDINGAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILUKADA 2010 DAN PEMILUKADA 2015 DI BANTUL



Sumber : *Komisi pemilihan Umum Daerah Bantul 2015*

PROSENTASE PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILUKADA 2015

D.I. YOGYAKARTA



Sumber : *Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul 2015*